

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Strategis Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	Kinerja						Keuangan				
			No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatkan efektivitas peran APPP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Levelling Kapabilitas APPP / (Internal Audit Capacity Models/IACM)	Level	0	0	0.00				
				Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	0	0	0.00					

No	No	Tujuan / Sasaran	Kinerja						Keuangan			
			Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)	
No	2	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	0	0	0.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	47.343.800	9.907.870	20.93	
								PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	40.294.700	11.792.100	29.26	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	47.237.400	3.533.370	7.48	
								PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.111.000	796.400	25.60	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	48.783.294	17.690.370	36.26	
								PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	214.282.470	24.516.470	11.44	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	74.433.800	6.978.370	9.38	
								PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.111.000	796.400	25.60	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	43.646.950	9.209.300	21.10	
								PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.111.000	796.400	25.60	

		Kinerja						Keuangan						
No	Sasaran Strategis Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	Kinerja						Keuangan					
			No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)	
			3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	Nilai kematangan organisasi Inspektorat	Nilai	0	0	0.00					
			4	Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	83	80.25	96.69	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.719.434.412	3.514.784.711	45.53	
					Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Indeks	0	0	0.00					
					Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	Orang/tahun	4	4	100.00					
					Jumlah Inovasi Inspektorat	Buah	0	0	0.00					
					IKM Inspektorat	Indeks	0	0	0.00					

B. FAKTOR PENDUKUNG

1. Kapabilitas APiP

Belum tersedia target atas indikator tujuan di Triwulan II Tahun 2025 karena proses penilaian oleh BPKP atas Kapabilitas APiP baru dilaksanakan di Triwulan II-III dan hasilnya baru terbit di akhir Desember setiap tahunnya sehingga target dan realisasinya baru muncul di Triwulan IV. Namun persiapan pelaksanaan Penilaian Mandiri telah disiapkan sejak Triwulan I seperti pelaksanaan Audit Kinerja Lintas Sektorial atas Ketahanan Pangan yang sudah dimulai persiapan pengawasannya di Triwulan I 2025 yang akan digunakan sebagai sampel dalam penilaian Kapabilitas APiP Tahun 2025 terkait audit kinerja. Kemudian rapat internal terkait realisasi renaisi tindak lanjut hasil penilaian Kapabilitas APiP Tahun 2024 sebagai pertimbangan nilai di penilaian Kapabilitas APiP Tahun 2025 yang juga telah di laksanakan di Triwulan I Tahun 2025. Kemudian di Triwulan II telah dibentuk Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Nomor 38 Tahun 2025, tanggal 4 Juni 2025.

2. Indeks Manajemen Risiko

Belum tersedia target atas indikator tujuan di Triwulan II Tahun 2025 karena proses penilaian oleh BPKP atas Indeks Penerapan Manajemen Risiko baru dilaksanakan di Triwulan III dan hasilnya baru terbit di Triwulan IV setiap tahunnya sehingga target dan realisasinya baru muncul di Triwulan IV. Namun persiapan pelaksanaan penilaian mandiri telah disiapkan sejak awal tahun seperti evaluasi atas penyusunan register risiko dan dokumen RTP tahun 2025 serta monitoring implementasi RTP Tahun 2024. Kemudian penyusunan perubahan Peraturan Bupati tentang SPIP yang telah disosialisasikan di Triwulan II untuk membantu kelancaran dalam Penilaian Mandiri SPIP yang telah dilaksanakan di Triwulan II di awal Bulan Juni 2025 oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri telah dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Kualitas Kabupaten Wonogiri di akhir Bulan Juni 2025. Selain itu, telah dilakukan rapat dengan perangkat daerah terkait untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian tahun sebelumnya.

Level Penyelenggaraan Maturitas SPIP

Belum tersedia target atas indikator tujuan di Triwulan II Tahun 2025 karena proses penilaian oleh BPKP atas Maturitas SPIP baru akan dilaksanakan di Triwulan III dan hasilnya baru terbit di Triwulan IV setiap tahunnya sehingga target dan realisasinya baru muncul di Triwulan IV. Namun persiapan pelaksanaan penilaian mandiri telah disiapkan sejak awal tahun seperti evaluasi atas penyusunan register risiko dan dokumen RTP tahun 2025 serta monitoring implementasi RTP Tahun 2024. Kemudian penyusunan perubahan Peraturan Bupati tentang SPIP yang akan disosialisasikan di Triwulan II, Bulan Mei 2025 untuk membantu kelancaran dalam Penilaian Mandiri SPIP yang telah dilaksanakan di Triwulan II di awal Bulan Juni 2025 oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri telah dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Kualitas Kabupaten Wonogiri di akhir Bulan Juni 2025. Selain itu, telah dilakukan rapat dengan perangkat daerah terkait untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian tahun sebelumnya.

Nilai Kematangan Organisasi

Indikator sasaran yang telah terrealisasi dengan capaian 100% pada :

Jumlah ASN Inspektorat yang Menjadi Agen Perubahan

Telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur untuk ASN yang akan menjadi agen perubahan di Triwulan II sesuai koordinasi dan rapat internal yang telah dilakukan di Triwulan I dengan 3 Agen Perubahan dari tahun sebelumnya dan penambahan 1 Agen Perubahan baru di tahun 2025. Kemudian di Triwulan II telah ditetapkan rencana aksi atas perubahan yang akan dilakukan oleh semua agen perubahan untuk kemudian direalisasikan di Triwulan III dan disusun laporannya di Triwulan IV.

Kemudian beberapa target atas indikator sasaran belum ditetapkan sampai dengan di Triwulan II sehingga untuk realisasinya juga masih 0, namun beberapa telah berjalan proses yang mendukung dalam pencapaian targetnya seperti :

1. Indeks Profesionalitas ASN

Hasil penilaian akan terbit di akhir tahun setiap tahunnya sehingga belum muncul target dan realisasinya di Triwulan II. Namun data pendukung yang dibutuhkan dalam penilaian telah dipersiapkan sejak Triwulan I seperti penyusunan rencana pendidikan pelatihan untuk penilaian IPASN yang dilanjutkan pendataan atas pegawai yang telah mengikuti diklat, seminar ataupun workshop dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II.

2. Jumlah Inovasi Inspektorat

Sesuai renstra tidak ditetapkan inovasi di Inspektorat untuk tahun 2025, masih melanjutkan inovasi yang sudah ada seperti Sistem Monitoring Hasil Pengawasan dan Layanan Pengaduan Digital. Meskipun tidak ditetapkan inovasi baru di tahun 2025 tapi perbaikan atas inovasi yang telah ada tetap dilakukan untuk peningkatan kinerja dan layanan di Inspektorat.

3. IKM Inspektorat

Penilaian dilaksanakan di Triwulan IV sehingga belum muncul target dan realisasinya. Namun, proses pengumpulan data survey telah dipersiapkan dan diedaran ke pengguna layanan di Inspektorat sejak Triwulan I hingga Triwulan II. Kemudian akan dilakukan juga Forum Group Discussion di Triwulan III untuk data tambahan dalam penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di triwulan IV.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Kapabilitas APiP dan Indeks Manajemen Risiko

Belum terdapat hambatan yang krusial dalam mendukung proses persiapan penilaian Kapabilitas APiP maupun Indeks Manajemen Risiko

Level Penyelenggaraan Maturitas SPIP

Belum terdapat hambatan yang krusial dalam mendukung proses penilaian mandiri Maturitas SPIP dan penjaminan kualitasnya

Nilai Kematangan Organisasi

Belum tersedia data untuk hasil penilaiannya, di Triwulan II baru dibentuk Tim dari Pemda untuk melakukan pendampingan dan penilaian atas kematangan organisasi pada Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan di Triwulan III

Tidak ada hambatan yang berisiko menghambat pencapaian target di Triwulan II karena semua bejelan masih dalam proses. Hanya saja untuk Penilaian AKIP yang telah terealisasi dengan nilai 80,25 jika dibandingkan dengan targetnya di Triwulan II dengan target 83 maka simpulannya adalah belum dapat tercapai untuk capaian kinerjanya atas Penilaian AKIP Inspektorat. Hal ini disebabkan oleh perubahan cara penilaian AKIP yang lebih kompleks dan penetapan target di Renstra yang terlalu tinggi karena masih mendasarkan pada pencapaian atas cara penilaian AKIP yang lama sehingga mengakibatkan target atas AKIP dan IPASN tidak pernah tercapai yang tentunya mempengaruhi dalam penilaian evaluasi AKIP setiap tahunnya.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Kapabilitas APJP dan Indeks Manajemen Risiko

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BPKP untuk proses penilaian jika dibutuhkan agar hasil penilaian dapat berjalan lancar dan tercapai sesuai targetnya untuk Kapabilitas APJP dan Indeks Manajemen Risiko

Level Penyelenggaraan Maturitas SPJP

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BPKP untuk proses penilaian jika dibutuhkan agar hasil penilaian dapat berjalan lancar dan tercapai sesuai targetnya

Milai Kematangan Organisasi

Tindak lanjutnya adalah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam mendukung penilaian kematangan organisasi yang akan dilaksanakan di Triwulan III

Tindak lanjut atas indikator sasaran penilaian AKIP yang belum mampu mencapai targetnya adalah diperlukan pemahaman mendalam tentang perubahan metode penilaian AKIP yang lebih kompleks untuk mengidentifikasi area yang terpengaruh oleh perubahan tersebut dan menyesuaikan strategi serta kebijakan Inspektorat agar lebih sesuai dengan kriteria penilaian yang baru.

Wonogiri, 16 Juli 2025

Inspektur



**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025**

: MULYANTO, S.E.
: Sekretaris
: MARDIANTO, S.E
: Inspektur

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No			Kinerja					Keuangan					
No	Sasaran Strategis	Indikator	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			No										
1	Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	1	Terselenggaranya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	%	56	44	78.57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.719.434.412	3.514.784.711	45.53
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	1.1	Terselenggaranya penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	%	50	50	100.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	309.750	7.74
		Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	1.2	Terselenggaranya administrasi keuangan daerah yang disusun	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	%	90	78.82	87.58	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.970.473.755	3.338.868.729	47.90
		Jumlah Inovasi Inspektorat	1.3	Terselenggaranya administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	%	40	40	100.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	999.940	820.000	82.00
		IKM Inspektorat	1.4	Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian	Persentase tertib administrasi kepegawaian	%	47	47	100.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.346.130	46.017.050	29.81
			1.5	Terselenggaranya fasilitas Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum perangkat daerah	%	56	48	85.71	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.918.100	23.459.000	15.97

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.6	Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	%	100	11	11.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.685.700	5.450.000	7.82
			1.7	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	50	50	100.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.433.900	83.935.144	32.35
			1.8	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	26	26	100.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.576.887	15.925.038	14.02

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kerjasama seluruh pegawai di Inspektorat yang kooperatif dalam mendukung pelaksanaan aktivitas operasional rutin kantor setiap bulannya.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Ketersediaan data dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai rencana aksi yang telah disusun

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Ketersediaan data keuangan dan koordinasi dengan BPKD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Keterlibatan pencatatan dan monitoring atas BMD pada Inspektorat

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Ketersediaan data kepegawaian dan keterlibatan pembahasan data kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat Daerah

-

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

-

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terpenuhinya pelaksanaan jasa penunjang urusan kantor seperti pembayaran listrik, gaji pegawai kontrak serta peralatan perlengkapan kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Ketersediaan anggaran untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dari 8 Kegiatan pendukung program penunjang urusan masih terdapat 3 kegiatan yang belum tercapai sesuai targetnya sampai dengan Triwulan II yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan

Tidak tercapai pada sub kegiatan penyediaan gaji yang sesuai indikator nya adalah orang per bulan dan target yang dicantumkan adalah 41 orang per bulan telah memperhitungkan CPNS dan PPPK di Tahun 2025 yang realisasinya belum masuk di Triwulan II 2025, tapi masih di Triwulan III Tahun 2025

2. Kegiatan Administrasi Umum

Ketidakefektifan kinerja atas fasilitasi kunjungan tamu di Triwulan II bukan disebabkan dari kinerja internal instansi maupun keterbatasan anggaran, namun memang realisasi atas fasilitasi tamu ini bersifat unpredictable dan ternyata realisasi atas fasilitasi tamu di Triwulan II belum mencapai targetnya yang artinya memang laporan atas fasilitasi tamu di Triwulan II tidak sebanyak yang telah ditargetkan di Triwulan II.

3. Kegiatan Pengadaan BMD

Belum selesai untuk proses penetapan penyedia barang dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PB-J) karena harus menyesuaikan dengan index harga yang telah direncanakan sehingga masih terdapat barang yang belum dapat terealisasi sampai dengan Triwulan II.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator jumlah orang dalam sub kegiatan penyediaan gaji yang tidak bisa sesuai dengan realisasinya karena target yang direncanakan untuk CPNS dan PPPK belum masuk di Triwulan II

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Ketidakefektifan kinerja atas fasilitasi kunjungan tamu di Triwulan II bukan disebabkan dari kinerja internal instansi maupun keterbatasan anggaran, namun memang realisasi atas fasilitasi tamu ini bersifat unpredictable dan ternyata realisasi atas fasilitasi tamu di Triwulan II belum mencapai targetnya yang artinya memang laporan atas fasilitasi tamu di Triwulan II tidak sebanyak yang telah ditargetkan di Triwulan II.

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Keterbatasan SDM di Inspektorat dengan PPKom dari Auditor sementara jumlah pengawasan dan aduan masyarakat yang harus ditangani semakin meningkat sehingga terjadi keterlambatan dari PPKom dalam menyusun KAK untuk pengajuan barang ke Bagian PB-J

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Melakukan monitoring terutama pada kegiatan yang belum tercapai di Triwulan II dan masih dalam proses agar capaian kinerja tetap dapat tercapai sesuai target kinerjanya di triwulan III

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah menarikan inputan Renja di SIPD-Ri ke dalam dokumen resmi Renja 2026 setelah penetapan RKPd 2026

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan administrasi keuangan di Triwulan III

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan administrasi BMD di Triwulan III

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan administrasi kepegawaian di Triwulan III

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan administrasi umum di Triwulan III

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Melakukan koordinasi dengan PPkom untuk realisasi yang belum terpenuhi di Triwulan II agar dapat terpenuhi di Triwulan berikutnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Melaksanakan pemenuhan jasa penunjang kantor di Triwulan III

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Melaksanakan pemeliharaan BMD sesuai rencana yang telah dituangkan dalam rencana aksi pencapaian target secara triwulanan



Inspektur
MARDIANTO, S.E.
197101241999031002

Wonogiri, 16 Juli 2025

Sekretaris

MULYANTO, S.E.
196806181993031010

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **Drs. EDY MARTONO, M.M**
 Jabatan Pelapor : **Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan**
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, S.E**
 Jabatan Pimpinan Pelapor : **Inspektur**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

		Kinerja						Keuangan					
No	Sasaran Strategis	Indikator	No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturnitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	Terealisasiya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	%	100	105.88	105.88	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	47.343.800	9.907.870	20.93
			1.1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	28	27	96.43	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	22.343.800	3.358.870	15.03
			1.2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	6	9	150.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	25.000.000	6.549.000	26.20
			2	Terealisasiya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	%	100	100	100.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	40.294.700	11.792.100	29.26
			2.1	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Laporan	2	2	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	3.111.000	796.400	25.60
			2.2	Tersusunnya laporan pendampingan & Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	Laporan	4	4	100.00	Pendampingan dan Asistensi	37.183.700	10.995.700	29.57

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan Rapat Rencana Operasional (RO) secara bulanan untuk monitoring dan pengendalian dalam pelaksanaan aktivitas pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan beberapa tugas mandatori lainnya diluar perencanaan dalam PKPT sehingga hasilnya melebihi target yang direncanakan

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025. Termasuk dalam pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu berhasil melebihi targetnya karena banyaknya penguasaan mandatori di luar rencana.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Berhasil melebihi targetnya karena adanya tugas mandatori pengawasan tertentu lainnya di luar perencanaan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di triwulan II

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Aktivitas pengawasan yang dijalankan telah sesuai dengan rencana pengawasan penguatan RB Bidang Pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta keikutsertaan dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait pengawasan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

Pendampingan dan Asistensi

Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah terkait dalam pendampingan dan asistensi Pembangunan ZI dan Monitoring Pembangunan ZI di Triwulan I sesuai yang direncanakan sehingga dapat terealisasi sesuai targetnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan SPIP serta pelaporan monitoring LHKAN dan Evaluasi Internal RB Triwulan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Pendampingan dan Asistensi

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan RO bulanan serta komitmen auditor dalam pelaksanaan aktivitas pengawasan sesuai rencana dalam PKPT yang telah disusun

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Menjalankan aktivitas pengawasan sesuai PKPT dengan menyesuaikan rapat operasional tiap bulannya serta memperhatikan prioritas atas target yang belum tercapai di Triwulan II Tahun 2025 agar dapat dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2025.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Menggunakan hasil rapat RO atas realisasi aktivitas PKPT untuk pencapaian target di triwulan III

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Melaksanakan aktivitas pengawasan di dalam PKPT serta tugas mandatori yang diberikan dalam mendukung RB penguatan pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena telah terselesaikan di Triwulan II

Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan kegiatan ZI dengan target 2 laporan atas Pembangunan ZI dan Monitoring Pembangunan ZI telah terselesaikan di Triwulan I sehingga tindak lanjutnya di triwulan II untuk kegiatan pendampingan dan asistensi adalah melaksanakan pendampingan pada semua perangkat daerah dalam pelaksanaan penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP Tahun 2025 dan melaksanakan monitoring dalam implementasi RTP Semester I Tahun 2025.

Kemudian di Triwulan II telah terlaksana atas pelaksanaan SPIP termasuk di dalamnya adalah pendampingan penilaian mandiri dan penjaminan kualitasnya. Untuk tindak lanjutnya di Triwulan III adalah melaksanakan monitoring RTP Semester I Tahun 2025 yang direncanakan di Triwulan II akhir, realisasinya baru akan dilaksanakan di Triwulan III, bulan Juli karena Triwulan II fokus dalam penyelesaian evaluasi AKIP. Selain itu, juga pelaksanaan evaluasi internal RB Triwulan II yang akan dilaksanakan di Triwulan III.

Wonogiri, 16 Juli 2025

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan

Drs. EDY MATTONO, M.M
196707051987021003



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SARDJITO, S.Sos.M.H
 Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
 Nama Pimpinan yang Melakukan Money : MARDIANTO, S.E
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturlitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	%	100	111.11	111.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	74.433.800	6.978.370	9.38
		1.1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	17	14	82.35	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	39.433.800	2.078.370	5.27	
		1.2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	16	160.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	35.000.000	4.900.000	14.00	
		2	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	%	100	100	100.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.111.000	796.400	25.60	
		2.1	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Laporan	2	2	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	3.111.000	796.400	25.60	

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan Rapat Rencana Operasional (RO) secara bulanan untuk monitoring dan pengendalian dalam pelaksanaan aktivitas pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan beberapa tugas mandatori lainnya di luar perencanaan dalam PKPT sehingga hasilnya melebihi target yang direncanakan

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Berhasil melebihi targetnya karena adanya tugas mandatori pengawasan tertentu lainnya di luar perencanaan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di triwulan II

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Aktivitas pengawasan yang dijalankan telah sesuai dengan rencana pengawasan penguatan RB Bidang Pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta kehadiran dalam penyelenggaraan rapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang kesejahteraan rakyat

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Beberapa sub kegiatan pendukung dalam kegiatan ini belum dapat tercapai targetnya karena banyaknya pengawasan mandatori di luar perencanaan seperti penanganan aduan dan pengawasan atas usulan alat kesehatan beserta ketersediaan ruang kesehatannya sehingga menunda pelaksanaan rencana rutin aktivitas pengawasan.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan RO bulanan serta komitmen auditor dalam pelaksanaan aktivitas pengawasan sesuai rencana dalam PKPT yang telah disusun

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan di Triwulan III dengan memperhatikan prioritas pengawasan sesuai hasil rapat RO bulanan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Menggunakan hasil rapat RO atas realisasi aktivitas PKPT untuk pencapaian target di triwulan III

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Melaksanakan aktivitas pengawasan di dalam PKPT serta tugas mandatori yang diberikan dalam mendukung RB penguatan pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Belum ada tindak lanjutnya untuk Triwulan III karena pelaksanaan perumusan kebijakan untuk penyusunan perubahan PKPT dengan mendasarkan perubahan APBD 2025 baru akan dilaksanakan di Triwulan IV serta Melaksanakan aktivitasnya di Triwulan III jika ada terkait perumusan kebijakan di bidang fasilitas pengawasan untuk bidang kesejahteraan rakyat

Wongiri, 16 Juli 2025

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

SARDJITO, S.Sos.M.H
196801071994031010



**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025**

: ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
: Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
: MARDIANTO, S.E
: Inspektur

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Money
Jabatan Pimpinan Pelapor

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	%	100	105.55	105.55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	48.783.294	17.690.370	36.26
			1.1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	15	14	93.33	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	18.783.294	3.820.870	20.34
			1.2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	3	5	166.67	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	30.000.000	13.869.500	46.23
			2	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	%	100	100	100.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	214.282.470	24.516.470	11.44
			2.1	Tersusunnya laporan pendampingan & Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	Laporan	2	2	100.00	Pendampingan dan Asistensi	211.171.470	23.720.070	11.23
			2.2	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	2	2	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3.111.000	796.400	25.60

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan Rapat Rencana Operasional (RO) secara bulanan untuk monitoring dan pengendalian dalam pelaksanaan aktivitas pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan beberapa tugas mandatori lainnya diluar perencanaan dalam PKPT sehingga hasilnya melebihi target yang direncanakan

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Berhasil melebihi targetnya karena adanya tugas mandatori pengawasan tertentu lainnya di luar perencanaan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di triwulan II

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Aktivitas pengawasan yang dijalankan telah sesuai dengan rencana pengawasan penguatan RB Bidang Pengawasan

Pendampingan dan Asistensi

Kerjasama yang baik antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Saber Pungli serta monitoring MCSP-KPK di Triwulan II

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta Kehadiran dalam penyelenggaraan rapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang pencegahan dan investigasi

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Masih belum tercapai target atas monitoring tindak lanjut di Triwulan II karena penyusunan beberapa laporan hasil pengawasan belum selesai sehingga belum dapat dilakukan monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasannya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Pendampingan dan Asistensi

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan RO bulanan serta komitmen auditor dalam pelaksanaan aktivitas pengawasan sesuai rencana dalam PKPT yang telah disusun

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Menjelaskan aktivitas pengawasan sesuai PKPT dengan menyesuaikan rapat operasional tiap bulannya serta memperhatikan prioritas atas target yang belum tercapai di Triwulan II Tahun 2025 agar dapat dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2025.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Menggunakan hasil rapat RO atas realisasi aktivitas PKPT untuk pencapaian target di triwulan III

PROGRAM PERUMUSAN KEHIAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Melaksanakan aktivitas pengawasan di dalam PKPT serta tugas mandatori yang diberikan dalam mendukung RB penguatan pengawasan

Pendampingan dan Asistensi

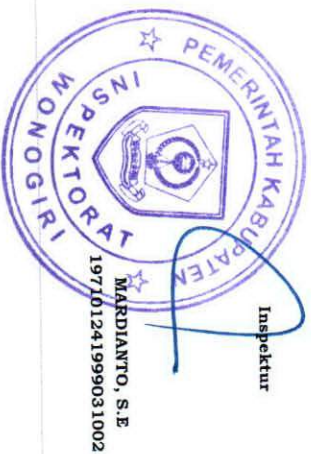
Melanjutkan pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan SPI dan Monitoring MCSP-KPK Triwulan II di Triwulan III

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Belum ada tindak lanjutnya untuk Triwulan III karena pelaksanaan perumusan kebijakan untuk penyusunan perubahan PKPT dengan mendasarkan perubahan APBD 2025 baru akan dilaksanakan di Triwulan IV dan Melaksanakan aktivitasnya terkait perumusan kebijakan di bidang fasilitas pengawasan untuk bidang pencegahan dan investigasi

Wonogiri, 16 Juli 2025

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi



ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E. M.M.
197006201994012001

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : DEWI ATTUTJANINGRUM, S.Sos., M.M
Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No		Indikator	Kinerja						Keuangan				
Sasaran Strategis			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	%	100	128	128.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	43.646.950	9.209.300	21.10
			1.1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	15	14	93.33	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	25.751.250	8.841.170	34.33
			1.2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	18	180.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	17.895.700	368.130	2.06
			2	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	%	100	100	100.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.111.000	796.400	25.60
			2.1	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	2	2	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3.111.000	796.400	25.60

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan Rapat Rencana Operasional (RO) secara bulanan untuk monitoring dan pengendalian dalam pelaksanaan aktivitas pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan beberapa tugas mandatori lainnya diluar perencanaan dalam PKPT sehingga melebihi target yang direncanakan

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Berhasil melebihi targetnya karena adanya tugas mandatori pengawasan tertentu lainnya di luar perencanaan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di triwulan II

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Aktivitas pengawasan yang dijalankan telah sesuai dengan rencana pengawasan penguatan RB Bidang Pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta Kehadiran dalam penyelenggaraan arapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang keuangan dan aset daerah

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
-	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
Masih belum tercapai target atas monitoring tindak lanjut di Triwulan II karena penyusunan beberapa laporan hasil pengawasan belum selesai sehingga belum dapat dilakukan monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasannya	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
-	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
-	

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan RO bulanan serta komitmen auditor dalam pelaksanaan aktivitas pengawasan sesuai rencana dalam PKPT yang telah disusun

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Menjalankan aktivitas pengawasan sesuai PKPT dengan menyesuaikan rapat operasional tiap bulannya serta memperhatikan prioritas atas target yang belum tercapai di Triwulan II Tahun 2025 agar dapat dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2025.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Menggunakan hasil rapat RO atas realisasi aktivitas PKPT untuk pencapaian target di triwulan III

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Melaksanakan aktivitas pengawasan di dalam PKPT serta tugas mandatori yang diberikan dalam mendukung RB penguatan pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Belum ada tindak lanjutnya untuk Triwulan III karena pelaksanaan perumusan kebijakan untuk penyusunan perubahan PKPT dengan mendasarkan perubahan APBD 2025 baru akan dilaksanakan di Triwulan IV serta Melaksanakan terkait perumusan kebijakan di bidang fasilitas pengawasan untuk bidang keuangan dan aset daerah

Wonogiri, 16 Juli 2025

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah

DEWI ATTUTTANINGRUM, S.Sos., M.M
197402061999032008



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEKAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **SRIYONO, S.Sos, M.M**
 Jabatan Pelapor : **Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan**
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, S.E**
 Jabatan Pimpinan Pelapor : **Inspektur**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturlitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	%	100	104	104.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	47.237.400	3.533.370	7.48
			1.1 Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	15	14	93.33	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	22.237.400	2.133.370	9.59
			1.2 Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	12	120.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	25.000.000	1.400.000	5.60
			2 Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	%	100	100	100.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.111.000	796.400	25.60
			2.1 Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Laporan	2	2	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	3.111.000	796.400	25.60

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Pelaksanaan Rapat Rencana Operasional (RO) secara bulanan untuk monitoring dan pengendalian dalam pelaksanaan aktivitas pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan beberapa tugas mandatori lainnya diluar perencanaan dalam PKPT sehingga hasilnya melebihi target yang direncanakan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal .
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Berhasil melebihi targetnya karena adanya tugas mandatori pengawasan tertentu lainnya di luar perencanaan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di triwulan II
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Aktivitas pengawasan yang dijalankan telah sesuai dengan rencana pengawasan penguatan RB Bidang Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta kehadiran dalam penyelenggaraan arapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang ekonomi dan pembangunan

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
-
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Masih belum tercapai target atas monitoring tindak lanjut di Triwulan II karena penyusunan beberapa laporan hasil pengawasan belum selesai sehingga belum dapat dilakukan monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasannya
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
-
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
-
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan RO bulanan serta komitmen auditor dalam pelaksanaan aktivitas pengawasan sesuai rencana dalam PKPT yang telah disusun

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Menjelaskan aktivitas pengawasan sesuai PKPT dengan menyesuaikan rapat operasional tiap bulannya serta memperhatikan prioritas atas target yang belum tercapai di Triwulan II Tahun 2025 agar dapat dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2025.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Menggunakan hasil rapat RO atas realisasi aktivitas PKPT untuk pencapaian target di triwulan III

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Melaksanakan aktivitas pengawasan di dalam PKPT serta tugas mandatori yang diberikan dalam mendukung RB penguatan pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Belum ada tindak lanjutnya untuk Triwulan III karena pelaksanaan perumusan kebijakan untuk penyusunan perubahan PKPT dengan mendasarkan perubahan APBD 2025 baru akan dilaksanakan di Triwulan IV.

Wonogiri, 16 Juli 2025

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan



SRIYONO, S.Sos, M.M
197103271991011002



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PECAJAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

: MURNI HASTUTI, S.E., M.M
: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Nama Pejabat yang Melakukan Monev
: MULYANTO, S.E.
Jabatan Pimpinan Pelapor
: Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Terselenggaranya penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	0	0
			2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	309.750	15.49
3	Terselenggaranya administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	3	Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	Dokumen	2	2	100.00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	999.940	830.000	82.00
4	Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian	Persentase tertib administrasi kepegawaian	4	Tercapainya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	4	100.00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	999.860	0	0
			5	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	100.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000	700.000	35.00
			6	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6	6	75.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.999.810	200.000	10.00
			7	Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2	100.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	999.860	0	0

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			8	Terealisasiya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20	100.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	148.346.600	45.117.050	30.41
9	Terselenggaranya fasilitas Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum perangkat daerah	9	Terealisasiya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.000	150.000	8.01
			10	Terealisasiya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.999.110	7.223.500	13.13
			11	Terealisasiya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.793.200	450.000	25.07
			12	Terealisasiya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.499.800	6.111.000	15.47
			13	Terealisasiya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.980	1.550.000	7.75
			14	Terusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	6	100.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	910.000	37.92
			15	Terealisasiya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	10	7	70.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.043.000	997.000	12.39
			16	Terusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	8	100.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.180.000	6.057.500	37.44
			17	Terusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	999.150	0	0
			18	Terusunnya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	999.860	0	0
19	Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	19	Terealisasiya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	16.67	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.820.000	5.450.000	8.54

No	Sasaran Kegiatan Atasasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			20	Terealisasinya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.865.700	0	0
21	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	21	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	6	100,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	230.000	6,25
			22	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	6	100,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.600.000	17.041.201	31,79
			23	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	100,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	1.750.943	19,45
			24	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	100,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1192.833.900	64.893.000	33,65
25	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	25	Terealisasinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.694.270	4.100.000	20,82
			26	Terealisasinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	100,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.188.617	10.475.038	13,06
			27	Terealisasinya Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0,00	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	220.000	11,00
			28	Terealisasinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	100,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000	1.130.000	22,65
			29	Terealisasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	0	0	0,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.704.000	0	0

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Telah tercapai sesuai rencana targetnya di Triwulan II untuk penyusunan dokumen perencanaan, yaitu Renja 2026 melalui input di aplikasi SIPD-RJ	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Ketersediaan data informasi dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJP) Tahun 2024	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
Keterlibatan pencatatan dan monitoring atas BMD pada Inspektorat	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
Ketersediaan data informasi terkait Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
Ketersediaan data informasi terkait penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
Ketersediaan data informasi terkait penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
Ketersediaan data informasi terkait penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Ketersediaan anggaran dan SDM dalam mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Ketersediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan rutin bulanan dalam pemenuhan penyediaan bahan bacaan	
Fasilitas Kunjungan Tamu	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Ketersediaan anggaran dalam penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
Ketersediaan tempat arsip dan kelengkapan dokumen yang akan diarsipkan dalam penatausahaan arsip periode Semester I	

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Ketersediaan dokumen yang akan didigitalkan menjadi dokumen elektronik untuk diunggah di laman resmi instansi sebagai indikator penilaian pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang dilakukan penilaiannya oleh Diskominfo Kabupaten Wonorejo.

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat di SKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan air, telepon, internet dan listrik di SKPD

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Ketersediaan anggaran untuk membayar gaji Non ASN dan pemenuhan kebutuhan perabot kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan untuk pimpinan SKPD dan Sekretaris

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan lapangan untuk operasional kantor

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin SKPD

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan

- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Fasilitas Kunjungan Tamu

Ketidakefektifan kinerja atas fasilitas kunjungan tamu di Triwulan II bukan disebabkan dari kinerja internal instansi maupun keterbatasan anggaran, namun memang realisasi atas fasilitas tamu ini bersifat unpredictable dan ternyata realisasi atas fasilitas tamu di Triwulan II belum mencapai targetnya yang artinya memang laporan atas fasilitas tamu di Triwulan II tidak sebanyak yang telah ditargetkan di Triwulan II.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
-	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Keterbatasan SDM di Inspektorat dengan PPKom dari Auditor sementara jumlah pengawasan dan aduan masyarakat yang harus ditangani semakin meningkat sehingga terjadi keterlambatan dari PPKom dalam menyusun KAK untuk pengajuan barang ke Bagian PBJ	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Keterbatasan SDM di Inspektorat dengan PPKom dari Auditor sementara jumlah pengawasan dan aduan masyarakat yang harus ditangani semakin meningkat sehingga terjadi keterlambatan dari PPKom dalam menyusun KAK untuk pengajuan barang ke Bagian PBJ	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
-	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlengkapan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
-	
Pemeliharaan Mebel	
Belum ada targetnya di Triwulan I begitu pula realisasinya karena rencana realisasinya masih di Triwulan IV	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Belum ada targetnya di Triwulan II begitu pula realisasinya karena rencana realisasinya masih di Triwulan IV	

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah menasalkan inputan Renja di SIPD-RI ke dalam dokumen resmi Renja 2026 setelah peneltapan FKPD 2026

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah menyelenggarakan rapat internal untuk membahas rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Auditor di Triwulan II untuk perbaikan implementasi AKIP di tahun berikutnya

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Melanjutkan pelaksanaan administrasi BMD di Triwulan III

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai di Triwulan III

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Melaksanakan penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian di Triwulan III

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Melaksanakan penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian di Triwulan III

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Melaksanakan penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di Triwulan III

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Menyusun jadwal pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi di Triwulan III

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Melanjutkan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan di Triwulan III sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Melanjutkan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Triwulan III sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Melanjutkan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Triwulan III sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Melanjutkan Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Triwulan III sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Melanjutkan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Triwulan III sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Melanjutkan pemenuhan penyediaan bahan bacaan di Triwulan III sesuai anggaran yang ada	
Fasilitasi Kunjungan Tamu Tindak lanjutnya adalah melanjutkan pelaksanaan penyediaan fasilitas kunjungan tamu di Triwulan III dengan menyesuaikan sisa anggaran yang masih ada	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Triwulan III	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah melaksanakan persiapan penatausahaan arsip untuk Semester II yang akan dilaksanakan di Triwulan IV	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah melakukan monitoring atas kelengkapan dokumen yang diunggah untuk penilaian SPBE di Triwulan III	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Melakukan koordinasi dengan PPKom untuk realisasi yang belum terpenuhi di Triwulan II agar dapat terpenuhi di Triwulan berikutnya	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Melakukan koordinasi dengan PPKom untuk realisasi yang belum terpenuhi di Triwulan II agar dapat terpenuhi di Triwulan berikutnya	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tindak lanjutnya adalah realisasi sesuai rencana di Triwulan III Tahun 2025 dalam melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Triwulan III	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Triwulan III	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Melaksanakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor di triwulan III	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melaksanakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di triwulan III	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Melanjutkan penyediaan jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak di Triwulan III dengan menyesuaikan anggaran yang masih ada untuk kendaraan dinas jabatan	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Melanjutkan penyediaan jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak di Triwulan III dengan menyesuaikan anggaran yang masih ada untuk kendaraan dinas lapangan untuk operasional kantor	

Pemeliharaan Mebel

Melanjutkan pelaksanaan pemeliharaan BMD mebel di Triwulan IV

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Melanjutkan pelaksanaan pemeliharaan BMD peralatan dan mesin lainnya di Triwulan III

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Melanjutkan pelaksanaan pemeliharaan BMD gedung kantor dan bangunan lainnya di Triwulan IV

Wenogiri, 16 Juli 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



MURNI NASTUTI, S.E., M.M.
197507102009032003

Sekretaris



MULYANTO, S.E.
196806181993031010

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PECAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : LANTIN ISTINGGAR, S.E., M.M
Jabatan Pelapor : Kepala Sub Bagian Keuangan
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : MULYANTO, S.E.
Jabatan Pimpinan Pelapor : Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

			Kinerja					Keuangan					
No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Terselenggaranya administrasi keuangan daerah yang disusun	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	1	Terealisasinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	41	34	82,93	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.968.473.755	3.337.893.729	47,90
			2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	975.000	97,50
			3	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	8	8	100,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.000.000	0	0

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Ketersediaan data yang didukung oleh kerjasama pegawai mempercepat penyelesaian laporan keuangan.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Ketersediaan data keuangan dan koordinasi dengan BPKD dalam penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Ketersediaan data keuangan dan koordinasi dengan BPKD dalam penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan SKPD

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tidak tercapai sesuai targetnya dikarenakan indikator nya adalah orang per bulan dan target yang dicantumkan telah memperhitungkan CPNS dan PPPK di Tahun 2025 yang realisasinya belum masuk di Triwulan II 2025, tapi masih di Triwulan III Tahun 2025

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Menjalkan aktivitas keuangan mengikuti aturan yang berlaku dengan tetap berkoordinasi dengan BPKD.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Telah terselesaikan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD di Triwulan I sehingga tidak ada lagi tindak lanjut penyusunannya di Triwulan II

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tindak lanjutnya adalah melanjutkan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD di Triwulan III

Sekretaris



MULYANTO, S.E.
196806181993031010

Wenogiri, 16 Juli 2025

Kepala Sub Bagian Keuangan



LANTIM ISTIMGGAR, S.E., M.M.
197404201997032002

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : FARRIKA KUSFANDARU, S.T.
Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Reriu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reriu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Hasil Reriu Laporan Kinerja	umlah Laporan Hasil Reriu Laporan Kinerja	Laporan	5	5	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	0	0	0.00	
3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Dokumen	0	0	0.00	
4	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	0.00	
5	Terealisasinya Kespsekatan Pengawasan Internal yang Terpentuk	Jumlah Kespsekatan Pengawasan Internal yang Terpentuk	5	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Antar Tim	Jumlah tersusunnya laporan hasil telah antar tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	0	0	0.00	
7	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Revisi Laporan Kinerja
Respon cepat dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah terkait serta arahan Inspektur untuk penyelesaian pelaksanaan pelaksanaan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah di Triwulan II
Pengawasan Desa
-
Monitoring Tindak Lanjut
-
Pengawasan Kinerja
-
Telaah Intern
-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-
Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pelaksanaan kegiatan saber pungi di Triwulan II

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Revisi Laporan Kinerja
Pengawasan Desa
Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II sehingga belum ada realisasinya
Monitoring Tindak Lanjut
Belum ditetapkan targetnya di triwulan II sehingga belum ada realisasinya
Pengawasan Kinerja
Belum ditetapkan targetnya di triwulan II sehingga belum ada realisasinya
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II Tahun 2025 sehingga target dan realisasinya masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada
Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Revisi Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjutnya di Triwulan III dan IV

Pengawasan Desa

Melaksanakan pengawasan dengan memperlombakan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Monitoring Tindak Lanjut

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APP pada triwulan III dan IV

Pengawasan Kinerja

Melaksanakan pengawasan kinerja sesuai dengan rencana dalam PKPT di triwulan IV

Tolab Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Perubahan Tahun 2025 yaitu pelaksanaannya di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai yang telah tercantum dalam PKPT Tahun 2025 untuk Triwulan III

Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan di Triwulan III sesuai PKPT Tahun 2025 untuk monitoring atas MCSP Triwulan II

 INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710424 199903 1 002	Wonogiri, 16 Juli 2025 Auditor Ahli Pertama  FARKHA KUSFANDARU, S.T. 199506082025062002
--	---

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Movev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: RIZA YOGA SUSANTO, S.E.
: Auditor Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasasn	Indiktor	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	9	9	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	2	2	66.67	
3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Dokumen	3	2	66.67	
4	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	0.00	
5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbenruk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbenruk	5	Tersusunnya Laporan Hasil Telah Antar Tim	Jumlah tersusunnya laporan hasil telah antar tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	3	5	166.67	
7	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan	2	3	150.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Revisi Laporan Kinerja	
Respon cepat dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah terkait serta arahan Inspektur untuk penyelesaian pelaksanaan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah di Triwulan II	
Pengawasan Desa	
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan.	
Monitoring Tindak Lanjut	
-	
Pengawasan Kinerja	
-	
-	
Telaah Intern	
-	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
Banyaknya penugasan mandatori di luar rencana PKPT Tahun 2025 yang telah ditetapkan seperti penanganan pengaduan masyarakat dan aktivitas pengawasan lainnya	
Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
Percepatan pelaksanaan kegiatan Saber Pungli yang direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dilakukan percepatan di Triwulan II karena adanya perubahan kebijakan dari pusat yang mengharuskan pembubaran Tim Saber Pungli sehingga realisasinya sampai dengan triwulan II melebihi targetnya dengan realisasi yaitu : pada Monitoring MCSP Triwulan I, persiapan pelaksanaan SPI Tahun 2025 dan kegiatan Saber Pungli.	

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Revisi Laporan Kinerja	
-	
Penguasaan Desa	
-	
Monitoring Tindak Lanjut	
Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi TL APHP masih belum memenuhi target karena pada TW II terdapat penggunaan penangguhan aduan masyarakat yang kompleks sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi TLHP APHP akan dilakukan di Triwulan III atau IV	
Penguasaan Kinerja	
Belum ditetapkan targetnya di triwulan II sehingga belum ada realisasinya	
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II Tahun 2025 sehingga target dan realisasinya masih "0"	
Penguasaan Dengan Tujuan Tertentu	
-	
Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
-	

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Revisi Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjutnya di Triwulan III dan IV

Penguasaan Desa

Melaksanakan penguasaan desa dengan memperibahgkan prioritas aktivitas penguasaan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Monitoring Tindak Lanjut

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada triwulan III dan IV

Penguasaan Kinerja

Melaksanakan penguasaan kinerja sesuai dengan rencana dalam PKPT di triwulan IV

Telah Intera : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Perubahan Tahun 2025 yaitu pelaksanaannya di Triwulan IV

Penguasaan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan penguasaan aktivitas penguasaan dengan tujuan tertentu di triwulan III sesuai yang telah direncanakan dalam PKPT Tahun 2025

Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan di Triwulan III sesuai PKPT Tahun 2025 untuk monitoring atas MCSP Triwulan II

 INSPEKTUR INSPEKTORAT WONOGIRI MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	 Auditey Pertama RIZA YOGA SUSANTO, S.E. 199703262020121005 Wonogiri, 16 Juli 2025
---	--

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Money
Jabatan Pimpinan Pelapor

: YULIA INDAH CINTAMI, SE, M.Si
: Auditor Muda
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	9	9	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	2	2	66.67	
3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Dokumen	3	2	66.67	
4	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	0.00	
5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Antar Tim	Jumlah tersusunnya laporan hasil telaah antar tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	3	5	166.67	
7	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan	2	3	150.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Reviu Laporan Kinerja	
Respon cepat dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah terkait serta arahan Inspektur untuk penyelesaian pelaksanaan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah di Triwulan II	
Pengawasan Desa	
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan.	
Monitoring Tindak Lanjut	
-	
Pengawasan Kinerja	
-	
Telaah Intern	
-	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
Dampaknya penggunaan mandatori di luar rencana PKRT Tahun 2025 yang telah ditetapkan seperti penanganan pengaduan masyarakat dan aktivitas pengawasan lainnya	
Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
Percepatan pelaksanaan kegiatan Saber Pungli yang direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dilakukan percepatan di Triwulan II karena adanya perubahan kebijakan dari pusat yang mengharuskan pembubaran Tim Saber Pungli sehingga realisasinya sampai dengan triwulan II melebihi targetnya dengan realisasi yaitu : pada Monitoring MCSP Triwulan I, persiapan pelaksanaan SPI Tahun 2025 dan kegiatan Saber Pungli.	

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Revisi Laporan Kinerja
Pengawasan Desa
Monitoring Tindak Lanjut
Unitik pelaksanaan monitoring dan evaluasi TL APJP masih belum memenuhi target karena pada TW II terdapat pengasan penangunan aduan masyarakat yang kompleks sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi TLHP APJP akan dilakukan di Triwulan III atau IV
Pengawasan Kinerja
Belum ditetapkan targetnya di triwulan II sehingga belum ada realisasinya
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II Tahun 2025 sehingga target dan realisasinya masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Revisi Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjutnya di Triwulan III dan IV

Pengawasan Desa

Melaksanakan pengawasan desa dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Monitoring Tindak Lanjut

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV

Pengawasan Kinerja

Melaksanakan pengawasan kinerja sesuai dengan rencana dalam PKPT di triwulan IV

Telah Intein : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Perubahan Tahun 2025 yaitu pelaksanaannya di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan aktivitas pengawasan dengan tujuan tertentu di triwulan III sesuai yang telah direncanakan dalam PKPT Tahun 2025

Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan di Triwulan III sesuai PKPT Tahun 2025 untuk monitoring atas MCSP Triwulan II

Wonogiri, 16 Juli 2025

Auditor Muda



YULIA INDAH CINTAMI, SE, M.Si
198007312009032007



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: Ir. MOH. RIFAI, M.Si.
: Auditor Utama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasas	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	17	17	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	6	5	83.33	
3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Dokumen	6	4	66.67	
4	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	0	0.00	
5	Terealisasinya Kespakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kespakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Antar Tim	Jumlah tersusunnya laporan hasil telaah antar tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	13	21	161.54	
7	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan	2	3	150.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Revisi Laporan Kinerja	Respon cepat dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah terkait serta arahan Inspektur untuk penyelesaian pelaksanaan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah di Triwulan II
Pengawasan Desa	
Monitoring Tindak Lanjut	
Pengawasan Kinerja	
Telaah Intern	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Banyaknya pengawasan mandatori di luar rencana PKPT Tahun 2025 yang telah ditetapkan seperti penanganan pengaduan masyarakat dan aktivitas pengawasan lainnya
	Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	Percepatan pelaksanaan kegiatan Saber Pungli yang direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dilakukan percepatan di Triwulan II karena adanya perubahan kebijakan dari pusat yang mengharuskan penunjukan Tim Saber Pungli sehingga realisasinya sampai dengan triwulan II melebihi targetnya dengan realisasi yaitu : pada Monitoring MCSP Triwulan I, persiapan pelaksanaan SPI Tahun 2025 dan kegiatan Saber Pungli.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Revisi Laporan Kinerja	
Pengawasan Desa	Untuk audit desa belum tercapai sesuai dengan target karena adanya pengawasan di luar PKPT seperti penanganan pengaduan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu
Monitoring Tindak Lanjut	Untuk pelaksanaan monitoring TL APJP masih belum memenuhi target karena pada TW II terdapat pengasan penanganan aduan masyarakat yang kompleks sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi TLHP APJP akan dilakukan di Triwulan III atau IV
Pengawasan Kinerja	Untuk audit kinerja dan ketepatan belum tercapai karena menunggu penentuan obyek pemeriksaan pada PKPT Perubahan dengan memperhatikan indikator dalam MCSP KPK
Telaah Intern	Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II Tahun 2025 sehingga target dan realisasinya masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Revisi Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjutnya di Triwulan III dan IV

Pengawasan Desa

Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Monitoring Tindak Lanjut

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan AP/PP pada triwulan III dan IV

Pengawasan Kinerja

Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Teknik Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Perubahan Tahun 2025 yaitu pelaksanaannya di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melaksanakan pelaksanaan pengawasan aktivitas pengawasan dengan tujuan tertentu di triwulan III sesuai yang telah direncanakan dalam PKPT Tahun 2025

Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan di Triwulan III sesuai PKPT Tahun 2025 untuk monitoring atas MCSP Triwulan II



MARDIANTO, SE
19710124 199903 1 002

Wonorejo, 16 Juli 2025

Auditor Utama

Ir. MOH. RIML, M.Si.
196405081990031007

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEKAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Money
Jabatan Pimpinan Pelapor

: FREDY GUNTARA, S.H.
: PPUPD Ahil Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja						Keterangan	
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi		(%)
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Revyu Manajemen ASN	Tersusunnya Laporan Revlu Manajemen ASN	Laporan	0	0	0.00	
			2	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Pengawasan Urusan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahah pada Perangkaat Daerah	Laporan	0	0	0.00	
			3	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu (Dokumen Rencana Pembangunan)	Tersusunnya Laporan Revlu Rancangan Akhir Renja Tahun 2026	Laporan	0	0	0.00	
					Tersusunnya Laporan Revlu Rancangan Akhir RPJMD	Laporan	1	1	100.00	
					Tersusunnya Laporan Revlu Rancangan Akhir Renstra	Laporan	0	0	0.00	
					Tersusunnya Laporan Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkaat daerah	Laporan	0	0	0.00	
5	Terealisasiya Perangkaat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkaat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5	Terealisasiya Perangkaat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPP pada Kabupaten Wonogiri	Laporan	1	1	100.00	
					Tersusunnya Laporan Pendampingan Penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026	Laporan	0	0	0.00	
					Tersusunnya Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RK Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026	Laporan	0	0	0.00	
					Tersusunnya Laporan Pendampingan Pemantauan Implementasi RTP	Laporan	0	0	0.00	
6	Terealisasiya Perangkaat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkaat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6	Terlaksananya Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Pelaksanaan (On Going) Tahun 2025	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Pelaksanaan	Laporan	2	2	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Reviu Manajemen ASN
-
Pengawasan Urusan Pemerintahan
-
Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2026
-
Reviu Rancangan Akhir RPJMD
1. Petugas Reviu meningkatkan kompetensinya melalui Bimtek secara on line
2. Penambahan personil reviu sebanyak 2 Orang
Reviu Rankhir Renstra
-
Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah
-
Penjamban Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SIPP Terintegrasi
1. Kolaborasi / hubungan yang baik antara pihak APP dengan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SIPP Terintegrasi
2. Pelaksanaan Pelaksanaan pendampingan ketika Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SIPP Terintegrasi.
Pendampingan Penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026
-
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026
-
Pendampingan Pemantauan Implementasi RTP
Telah terselesaikan di Triwulan I atas monitoring implementasi RTP semester II Tahun 2024 dengan faktor pendukungnya yaitu terkait pemahaman penyelenggaraan SIPP di Level OPD telah memadai
Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi
Telah terlaksana evaluasi internal RB Tahap Pelaksanaan atas Triwulan I dan II Tahun 2025 dengan beberapa faktor pendukungnya adalah sebagai berikut :
1. Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi
2. Tersedia aplikasi reviu dari Kemorgan
3. Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Revisi Manajemen ASN
Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II. Hal ini dikarenakan data-data yang dibutuhkan dalam proses Revisi baru tersedia di sekitar akhir Triwulan III
Pengawasan Urusan Pemerintahan
Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II
Revisi Rancangan Akhir Renja Tahun 2026
Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II
Revisi Rancangan Akhir RPJMD
1. Proses tindak lanjut dari Ombudsman menemukan waktu yang lama, menyebabkan penyusunan LHP terhambat. 2. Pemberian Materi revisi dengan waktu yang mendekati deadline (tidak sesuai jadwal agenda kerja)
Revisi Rancangan Renstra
Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II
Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah
Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II
Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SIPP Terintegrasi
Perangkat Daerah yang didampingi sebanyak 53 PD, namun Pendampingnya hanya 5 Orang
Pendampingan Penyusunan RK Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026
Pelaksanaan masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasinya di Triwulan II
Astetensi dan Evaluasi Penyusunan RK Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026
Pelaksanaan masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasinya di Triwulan II
Pendampingan Pematanaan Implementasi RTP
Telah terselesaikan pelaksanaannya di Triwulan I atas monitoring implementasi RTP semester II Tahun 2024 dengan faktor penghambatnya adalah kesulitan dalam menemukan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan
Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi
Berikut adalah beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses evaluasi internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan I dan II Tahun 2025 : 1. Tim Strategic Transformation Unit (STU) terbatas dalam melaksanakan monitoring 2. Aplikasi yang disediakan oleh monopoli sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Revisi Manajemen ASN Tindak lanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan revisi untuk manajemen ASN di Triwulan III dengan menginformasikan ke perangkat daerah terkait untuk dapat mempersiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kelancaran proses revisi di akhir Triwulan III. Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak lanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Triwulan III pada perangkat daerah terkait yang telah direncanakan dalam dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025. Revisi Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 Tindak lanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan revisi renkhir Renja 2026 di Triwulan III pada perangkat daerah terkait yang telah direncanakan dalam dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025. Revisi Rancangan Akhir RPJMD Tindak lanjutnya untuk mengatasi faktor penghambat yang ada, adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi dengan OPD lebih intensif 2. Bersuara ke OPD untuk mengingatkan waktu pelaksanaan pengawasan Revisi Renkhir Renstra Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah mempersiapkan dalam pelaksanaan revisi renkhir Renstra pada perangkat daerah terkait sesuai yang telah disatunkan dalam rencana PKPT Tahun 2025 Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah mempersiapkan dalam pelaksanaan monitoring SPM pada perangkat daerah terkait sesuai yang telah dicantumkan dalam rencana PKPT Tahun 2025 Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Peningkatan kompetensi APD agar lebih banyak lagi SDM yang beretifikasi untuk melakukan pengawasan penjaminan kualitas Pendampingan Penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026 Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah pelaksanaan atas pendampingan penyusunan RR strategis dan operasional OPD Tahun 2026 Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026 Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah pelaksanaan atas asistensi dan evaluasi penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026 Pendampingan Pemantauan Implementasi RTP Tindak lanjutnya di Triwulan II adalah melakukan pertemuan dalam pemantauan atas dokumen RTP Semester I Tahun 2025 yang pelaksanaan monitoringnya di Triwulan III Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi 1. Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara APD, tim STU dan OPD pengampu 2. Menyediakan Backup sarana sarana evaluasi pengganti aplikasi monopu			Wonorejo, 16 Juli 2025 PPUPD Ahli Pertama FREDY GUNTARA, S.H. 199112132025061001		
INSPEKTORAT WONGIRI INSPEKTOR MASYARATU, SE 19771017-8-199903 1 002					

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Money
Jabatan Pimpinan Pelapor

: ENI SUSANTI, S.E
: Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat
: MULYANTO, S.E.
: Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No		Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja						
				No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri	Dokumen	1	1	100.00	
			2	Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri	Dokumen	1	1	100.00	
			3	Penyusunan Rencana Aksi dan Monitoring Triwulanan atas Implementasi Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Monitoring Triwulanan atas Implementasi Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri	Dokumen	2	3	150.00	
			4	Penyusunan Laporan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri	Jumlah Laporan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri	Laporan	1	1	100.00	
			5	Penyelenggaraan Rapat Operasional Aktivitas Pengawasan Bulanan sesuai PKPT yang Telah Disusun pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	Jumlah Rapat Operasional Aktivitas Pengawasan Bulanan sesuai PKPT yang Telah Disusun pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	Laporan	6	6	100.00	
6	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2024	Jumlah Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2024	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
			7	Penyusunan Laporan atas Realisasi Kinerja dan Keuangan Bulanan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	Jumlah Laporan atas Realisasi Kinerja dan Keuangan Bulanan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	Laporan	6	6	100.00	
			8	Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2024	Jumlah Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2024	Laporan	1	1	100.00	
			9	Penyusunan atas Rekap Data Realisasi Aktivitas Pengawasan Bulanan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	Jumlah Rekap Data Realisasi Aktivitas Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	Data	6	6	100.00	
			10	Penyusunan atas Rekap Data Realisasi Penggunaan Anggaran Aktivitas Pengawasan Bulanan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	Jumlah Rekap Data Realisasi Penggunaan Anggaran Aktivitas Pengawasan Bulanan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	Data	6	6	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Tersedianya data dan penyelenggaraan rapat internal serta arahan dan dukungan dari pimpinan dalam menyusun inputan renja tahun 2026 di SIPP-RI sehingga tercapai sesuai rencana targetnya di Triwulan II
Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Telah terbitnya pedoman MCSP-KPK yang dijadikan sebagai dasar dalam Penyusunan Perubahan PKPT Tahun 2025 menyesuaikan penguasan mandatori yang tertuang di dalam indikator MCSP-KPK Tahun 2025
Penyusunan Monitoring Triwulanan atas Implementasi Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri
Tersedianya data dan dokumen bukti dukung dalam penyusunan monitoring atas implementasi rencana aksi RB Triwulan I dan II
Penyusunan Laporan PPRG : ketersediaan data dan dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan PPRG serta keikutsertaan pelatihan penyusunan PPRG
Penyelenggaraan Rapat RO : komitmen semua bidang dan arahan Inspektur dalam mendukung penyelenggaraan rapat RO bulanan
Penyusunan LKJP Tahun 2024 : ketersediaan data dokumen pendukung, koordinasi dengan semua bidang serta arahan dan masukan dari Inspektur dalam penyusunan LKJP Tahun 2024
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Bulanan : ketersediaan data dokumen pendukung dan koordinasi dengan bidang untuk pengisian laporannya
Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 : ketersediaan data pendukung dalam penyusunannya
Penyusunan atas Rekap Data Realisasi Aktivitas Pengawasan Bulanan : ketersediaan data dan hasil koordinasi dengan tim pelaksana untuk pengisian Rekap Data Realisasi Aktivitas Pengawasan Bulanan secara real time dan update
Penyusunan atas Rekap Data Realisasi Penggunaan Anggaran Pengawasan Bulanan : ketersediaan data dan hasil koordinasi dengan tim pelaksana untuk pengisian Rekap Data Realisasi Penggunaan Anggaran Pengawasan Bulanan secara real time dan update

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
-
Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
-
Penyusunan Monitoring Triwulanan atas Implementasi Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri
-
Penyusunan Laporan PPRG
-
Penyelenggaraan Rapat RO
-
Penyusunan LKJIP Tahun 2024
-
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Bulanan
-
Penyusunan laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024
-
Penyusunan atas Rekap Data Realisasi Aktivitas Pengawasan Bulanan
-
Penyusunan atas Rekap Data Realisasi Penggunaan Anggaran Pengawasan Bulanan
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah menasirkan hasil input Renja 2026 di SIPD-RJ menjadi dokumen Renja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Belum ada tindak lanjutnya atas penyusunan perubahan PKPT 2025 untuk Triwulan III karena telah terselesaikan di Triwulan II. Kemudian untuk perubahan kedua dengan mendasari Perubahan APBD 2025, pelaksanaannya masih di Triwulan IV setelah APBD ditetapkan jika tidak ada perubahan regulasi

Penyusunan Monitoring Triwulanan atas Implementasi Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Melanjutkan pelaksanaan monitoring implementasi renaksi RB di Triwulan III

Penyusunan Laporan PPRG : telah tercapai 100% di Triwulan I sehingga tidak ada rencana tindak lanjutnya di Triwulan III

Penyelenggaraan Rapat RO : Melanjutkan pelaksanaannya di triwulan III

Penyusunan LKJP Tahun 2024 : telah tercapai 100% di Triwulan I sehingga tidak ada rencana tindak lanjutnya di Triwulan III terkait penyusunannya namun akan dilaksanakan pemenuhan atas rekomendasi hasil penilaiannya di Triwulan III

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Bulanan : melanjutkan pelaksanaannya di Triwulan III atas capaian kinerja dan keuangan bulanan

Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 : telah terealisasi 100% di Triwulan I sehingga tidak ada rencana tidak lanjutnya di Triwulan III

Penyusunan atas Rekap Data Realisasi Aktivitas Pengawasan Bulanan : melanjutkan pelaksanaannya di Triwulan III

Penyusunan atas Rekap Data Realisasi Penggunaan Anggaran Pengawasan Bulanan : melanjutkan pelaksanaannya di Triwulan III

Sekretaris  MULYANTO, S.E. 196806181993031010	Wonogiri, 16 Juli 2025 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat  ENI SUSANTI, S.E 198911162020122001
--	--

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEKAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: WIYADI, S.E
: Pengelola Layanan Operasional
: MURNI HASTUTI, S.E., M.M
: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terealisasiya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pembayaran pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	100.00	
2	Terealisasiya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perlatihannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perlatihannya	2	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional etau lapangan dan pembayaran pajaknya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perlatihannya	Unit	2	2	100.00	
3	Terealisasiya Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0	0	0.00	
4	Terealisasiya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4	100.00	
5	Terealisasiya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pembayaran pajaknya
Ketersediaan anggaran dan data dalam mendukung kelancaran pemeliharaan kendaraan jabatan
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan pembayaran pajaknya
Ketersediaan anggaran dan data dalam mendukung pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan mebel
-
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin seperti AC, printer, scanner dan lainnya
Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya
-

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pembayaran pajaknya
-
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan pembayaran pajaknya
-
Pemeliharaan mebel
Belum ditetapkan targetnya di triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada, rencana pelaksanaan masih di Triwulan IV
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
-
Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya
Belum ditetapkan targetnya di Triwulan I sehingga belum tersedia realisasinya sampai dengan Triwulan II

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pembayaran pajaknya
Melanjutkan pelaksanaannya di triwulan III

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan pembayaran pajaknya

Melanjutkan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan operasional di Triwulan III

Pemeliharaan mebel

Belum ada tindak lanjutnya di triwulan II karena pelaksanaannya masih di Triwulan IV

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Melanjutkan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin untuk triwulan II

Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya

Belum ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena pelaksanaannya masih di Triwulan IV sesuai rencana akal yang telah disusun

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  MURNI HASTUTI, S.E., M.M 197507102009032003	Wonorejo, 16 Juli 2025 Pengelola Layanan Operasional  WIYADI, S.E 197010132008011004
--	--

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: SITI DARYANTININGSIH, S.E
: Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Keuangan
: LANTIN ISTINGGAR, S.E., M.M
: Kepala Sub Bagian Keuangan

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Saasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tercapainya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tersusunnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	8	8	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Laporan	1	1	100.00	
3	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	6	6	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

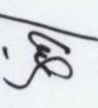
Gaji dan Tunjangan ASN
Ketersediaan data yang didukung oleh kerjasama pegawai mempercepat penyelesaian laporan keuangan.
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Ketersediaan data dan dokumen pendukung serta kerjasama dan koordinasi internal yang baik dalam mendukung penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Ketersediaan data dan koordinasi yang baik dengan BPKD dalam mendukung penyusunan laporan keuangan bulanan

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Gaji dan Tunjangan ASN
-
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
-
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Gaji dan Tunjangan ASN
Menjelaskan aktivitas keuangan mengikuti aturan yang berlaku dengan tetap berkoordinasi dengan BPKD
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena penyusunan laporan keuangan akhir tahun telah terselesaikan di Triwulan I
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Melanjutkan pelaksanaan atas penyusunan laporan keuangan bulanan di Triwulan III

Kepala Sub Bagian Keuangan	Wonorejo, 16 Juli 2025
	
LANTIN ISTINGGAR, S.E., M.M 19740420197032002	SITI DARVANTININGSIH, S.E 196912272007012016

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : MARDIONO, S.E
Jabatan Pelapor : Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MULYANTO, S.E.
Jabatan Pimpinan Pelapor : Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	1	Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Reguler, Audit Tertentu, Audit Khusus dan Audit Kinerja) di Inspektorat	Jumlah Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Reguler, Audit Tertentu, Audit Khusus dan Audit Kinerja) di Inspektorat	Laporan	25	25	100,00	
			2	Terdokumentasinya Hasil Pemeriksaan (Reviu) di Lingkungan Inspektorat	Jumlah Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan (Reviu) di Lingkungan Inspektorat	Laporan	45	45	100,00	
			3	Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan (Asistensi, Monitoring dan Evaluasi) di Lingkungan Inspektorat	Jumlah Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan (Asistensi, Monitoring dan Evaluasi) di Lingkungan Inspektorat	Laporan	39	39	100,00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

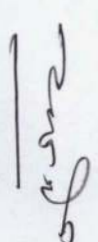
Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Reguler, Audit Tertentu, Audit Khusus dan Audit Kinerja) di Inspektorat
Tersedianya sarana dan prasarana serta laporan hasil pengawasan yang akan didokumentasikan
Terdokumentasinya Hasil Pemeriksaan (Reviu) di Lingkungan Inspektorat
Tersedianya sarana dan prasarana serta laporan hasil pengawasan yang akan didokumentasikan
Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan (Asistensi, Monitoring dan Evaluasi) di Lingkungan Inspektorat
Tersedianya sarana dan prasarana serta laporan hasil pengawasan yang akan didokumentasikan

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Reguler, Audit Tertentu, Audit Khusus dan Audit Kinerja) di Inspektorat	
Terdokumentasinya Hasil Pemeriksaan (Revisi) di Lingkungan Inspektorat	
Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan (Asistensi, Monitoring dan Evaluasi) di Lingkungan Inspektorat	

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Reguler, Audit Tertentu, Audit Khusus dan Audit Kinerja) di Inspektorat	
Melanjutkan pelaksanaannya di Triwulan III sesuai rencana targetnya	
Terdokumentasinya Hasil Pemeriksaan (Revisi) di Lingkungan Inspektorat	
Melanjutkan pelaksanaannya di Triwulan III sesuai rencana targetnya	
Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan (Asistensi, Monitoring dan Evaluasi) di Lingkungan Inspektorat	
Melanjutkan pelaksanaannya di Triwulan III sesuai rencana targetnya	

Sekretaris  MULYANTO, S.E. 196806181993031010	Wonorejo, 16 Juli 2025 Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat  MARDIONO, S.E. 197012152014061002
---	---

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : AGUSTIN RATRIANA, SE
Jabatan Pelapor : Auditor Madya
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE 2

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	100.00	
3	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	6	6	100.00	
4	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100.00	
5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	6	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Dokumen	4	3	75.00	
7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	0	0.00	
8	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	18	180.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan
Pengawasan Keuangan
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan
Reviu Laporan Kinerja
Arahkan pimpinan dalam percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP dengan penyelesaian di Triwulan II
Reviu Laporan Keuangan
Dukungan pimpinan dan perangkat daerah terkait sehingga pelaksanaan reviu LKPD Kabupaten Wonogiri dapat berjalan sesuai rencana dan terselesaikan sesuai waktunya
Telaah Intern
-
Monitoring Tindak Lanjut
-
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Adanya penugasan mandatori tambahan di luar perencanaan dalam PKPT di triwulan II terkait efisiensi anggaran dan klarifikasi atas penanganan pengaduan

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja
-
Pengawasan Keuangan
-
Reviu Laporan Kinerja
-
Reviu Laporan Keuangan
-
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II sehingga realisasinya juga masih "0"
Monitoring Tindak Lanjut
Beberapa laporan pemeriksaan belum terselesaikan untuk dilakukan monitoring tindak lanjutnya
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
Untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah belum tercapai karena pembahasan kerugian daerah dari BPK dilaksanakan pada Triwulan III
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan Pengawasan Keuangan Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah pelaksanaan atas Asistensi Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan BPK RI dengan rencana pelaksanaan sesuai PKPT di Bulan September Reviu Laporan Kinerja Melaksanakan monitoring tindak lanjutnya di Triwulan III dan IV Reviu Laporan Keuangan Tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III maupun IV karena proses reviu LKPD telah terselesaikan di Triwulan I, kemudian untuk proses tindak lanjutnya dari BPK berada pada sub kegiatan yang lain terkait sub kegiatan monitoring tindak lanjut Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Tahun 2025 Monitoring Tindak Lanjut Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP pada Triwulan III dan IV Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Pelaksanaan pembahasan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan BPK di Triwulan III Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan	
--	--

INSPEKTUR PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI INSPEKTORAT MANDIANTO, SE 19710404 199003 1 002	Wongiri, 16 Juli 2025 Auditor Madya AGUSTIN RATRIANA, SE 198508222009032008
--	---

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Money
Jabatan Pimpinan Pelapor

: JAROD MALADI GUNAWAN, A.Md
: Auditor Penyelia
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

		Kinerja								
No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	100.00	
3	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	6	6	100.00	
4	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100.00	
5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Hasil Telah Intern Antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	6	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Dokumen	4	3	75.00	
7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	0	0.00	
8	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	18	180.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan
Pengawasan Keuangan
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan
Revisi Laporan Kinerja
Arahan pimpinan dalam percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP dengan penyelesaian di Triwulan II
Revisi Laporan Keuangan
Dukungan pimpinan dan perangkat daerah terkait sehingga pelaksanaan revisi LKPD Kabupaten Wonogiri dapat berjalan sesuai rencana dan terselesaikan sesuai waktunya
Telaah Intern
-
Monitoring Tindak Lanjut
-
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Adanya penguasan mandatori tambahan di luar perencanaan dalam PKPT di triwulan II terkait efisiensi anggaran dan klarifikasi atas penanganan pengaduan

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja
-
Pengawasan Keuangan
-
Revisi Laporan Kinerja
-
Revisi Laporan Keuangan
-
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II sehingga realisasinya juga masih "0"
Monitoring Tindak Lanjut
Beberapa laporan pemeriksaan belum terselesaikan untuk dilakukan monitoring tindak lanjutnya
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
Untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah belum tercapai karena pembahasan kerugian daerah dari BPK dilaksanakan pada Triwulan III
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan	
Pengawasan Keuangan Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah pelaksanaan atas Asistensi Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan BPK RI dengan rencana pelaksanaan sesuai PKPT di Bulan September	
Revisi Laporan Kinerja Melaksanakan monitoring tindak lanjutnya di Triwulan III dan IV	
Revisi Laporan Keuangan Tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III maupun IV karena proses revisi LKPD telah terselesaikan di Triwulan I, kemudian untuk proses tindak lanjutnya dari BPK berada pada sub kegiatan yang lain terkait sub kegiatan monitoring tindak lanjut	
Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Tahun 2025	
Monitoring Tindak Lanjut Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP pada Triwulan III dan IV	
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Pelaksanaan pembahasan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan BPK di Triwulan III	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan	

 INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19740124 199903 1 002	Wonogiri, 16 Juli 2025 Atas Nama Penyelia  JAROD MALADI GUNAWAN, A.Md 197606042011011003
--	--

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEKAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Movev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: FARIDA ISMI TRI HAPSARI, S.H.
: PPUPD Ahli Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No		Saaran Kegiatan Atasan		Indikator		Kinerja						Keterangan
No	Saaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)						
1	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Reviu Manajemen ASN	Laporan	0	0	0.00				
		2	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Pengawasan Urusan Pemerintahan	Laporan	0	0	0.00					
		3	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu (Dokumen Rencana Pembangunan)	Laporan	0	0	0.00					
				Terusunnya Laporan Reviu Rencana Akhir Renja Tahun 2026	Laporan	0	1	100.00				
				Terusunnya Laporan Reviu Rencana Akhir RPJMD	Laporan	0	0	0.00				
				Terusunnya Laporan Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah	Laporan	0	0	0.00				
5	Terlaksananya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Terlaksananya Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Pelaksanaan (On Going) Tahun 2025	Laporan	2	2	100.00				
6	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	6	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Laporan	0	0	0.00				
7	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	7	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	0	0	0.00				
8	Terusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	8	Terusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APUP	Dokumen	0	0	0.00				
9	Terlaksananya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	9	Terusunnya Laporan Hasil Telaah Intern antar Tim	Laporan	0	0	0.00				
10	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	0	0	0.00				

B. FAKTOR PENDUKUNG

-	Revisi Manajemen ASN
-	Pengawasan Urusan Pemerintahan
-	Revisi Rancangan Akhir Renja Tahun 2026
-	Revisi Rancangan Akhir RPJMD
-	1. Peningkatan Revisi ditingkatkan kompetensinya melalui Bimtek secara on line
-	2. Penambahan personil revisi sebanyak 2 Orang
-	Revisi Renakhir Renstra
-	Monitoring atas Pelaksanaan GPM pada perangkat daerah
-	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi
-	Telah terlaksana evaluasi internal KB Tahap Pelaksanaan atas Triwulan I dan II Tahun 2025 dengan beberapa faktor pendukungnya adalah sebagai berikut :
-	1. Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi
-	2. Tersedia aplikasi revisi dari Kemempun
-	3. Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonorejo
-	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
-	Pengawasan Desa
-	monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APSP
-	Telaah Intern
-	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu : berhasil melebihi targetnya karena adanya tugas mandatori pengawasan tertentu lainnya yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan seperti penanganan/kurasi aduan masyarakat

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Reviu Manajemen ASN	Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II. Hal ini dikarenakan data-data yang dibutuhkan dalam proses Reviu baru tersedia di sekitar akhir Triwulan III
Pengawasan Urusan Pemerintahan	Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II
Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2026	Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II
Reviu Rancangan Akhir RPJMD	1. Proses tindak lanjut dari Obvle memakan waktu yang lama, menyebabkan penyusunan LHP terhambat. 2. Pemberian Materi reviu dengan waktu yang mendekati deadline (tidak sesuai jadwal agenda kerja)
Reviu Rankhir Renstra	Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II
Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah	Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II
Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi	Berikut adalah beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses evaluasi internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan I dan II Tahun 2025 : 1. Tim Strategic Transformation Unit (STU) terlambat dalam melaksanakan monitoring 2. Aplikasi yang disediakan oleh mngan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Belum ditetapkan targetnya di Triwulan I sehingga realisasi juga belum ada karena direncanakan pelaksanaannya masih di Triwulan IV
Pengawasan Desa	Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II sehingga belum ada realisasinya monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APSP Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II sehingga belum ada realisasinya Telah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan I sehingga realisasinya juga masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: ALFI FAJRIAN MUKTI, S.H.
: Auditor Abi Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	0	0	0.00	
3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	3	Tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP	Dokumen	0	0	0.00	
4	Terelisasinya Keesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Keesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Intern antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
5	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan.
Pengawasan Desa
-
monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APUP
-
Telaah Intern
-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu : berhasil melebihi targetnya karena adanya tugas mandatori pengawasan tertentu lainnya yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan seperti penanganan/klarifikasi aduan masyarakat

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
-
Pengawasan Desa
Belum ditetapkan targetnya di triwulan II sehingga belum ada realisasinya monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APUP
Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II sehingga belum ada realisasinya
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan I sehingga realisasinya juga masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah menyelesaikan laporan atas pelaksanaan audit kinerja yang telah selesai di akhir Triwulan II dan melanjutkan pengawasan sesuai dengan RO tiap bulan

Pengawasan Desa

Melaksanakan pengawasan sesuai dengan RO tiap bulan

monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APJP

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV

Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Tahun 2025 di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu : Menjalankan aktivitas pengawasan sesuai PKPT Tahun 2025 dengan menyesuaikan rapat operasional tiap bulannya serta memperhatikan prioritas jika mendapatkan tugas tambahan/ tugas mandatori di luar PKPT



Wonogiri, 16 Juli 2025

Auditor Ahli Pertama

ALFI FAJRIAN MUKTI, S.H.

199809262025062002

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Movev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: HERY SUBYANTO, S.IP
: Auditor Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE-2

No	Saaran Kegiatan Atas	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	
2	Terusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Terusunnya Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja	Terusunnya Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja	Laporan	9	9	100.00	
3	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	1	1	100.00	
4	Terusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	4	Terusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil pemeriksaan APJP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP	Dokumen	3	2	66.67	
5	Teralisainya Keesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Keesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Terusunnya Laporan Hasil Telaah Intern antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	12	120.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan.
Evaluasi AKIP
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan
Pengawasan Desa
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan
monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APJP
-
Telaah Intern
-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu : berhasil melebihi targetnya karena tugas mandatori pengawasan tertentu lainnya yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan seperti penanganan/kurifikasi aduan masyarakat

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
-
Evaluasi AKIP
-
Pengawasan Desa
-
monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APJP
Beberapa aktivitas pengawasan yang dijalankan sudah ditindaklanjuti secara cepat oleh obrik sebelum terbit laporan sehingga tidak membutuhkan monitoring tindak lanjutnya
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan 1 sehingga realisasinya juga masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah menyelesaikan laporan atas pelaksanaan audit kinerja yang telah selesai di akhir Triwulan II dan melanjutkan pengawasan sesuai dengan RO tiap bulan

Evaluasi AKIP

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APip pada triwulan III dan IV

Pengawasan Desa

Melaksanakan pengawasan sesuai dengan RO tiap bulan

monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APip

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APip pada triwulan III dan IV

Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Tahun 2025 di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu : Menjalankan aktivitas pengawasan sesuai PKPT Tahun 2025 dengan menyesuaikan rapat operasional tiap bulannya serta memperhatikan prioritas jika mendapatkan tugas tambahan/ tugas mandatori di luar PKPT

 INSPEKTUR MARWANTO, SE #71012# 199903 1 002	Wonogiri, 16 Juli 2025 Auditor Pertama  HERY SUBYANTO, S.IP 197906302006041008
--	---

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: PAMELA DEVI CAHYARINI, S.Ak.
: Auditor Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

Kinerja										
No	Sasaran Kegiatan Atasasan	Indikator	Kinerja				Realisasi	(%)	Keterangan	
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan				Target Triwulan 2
1	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	
2	Terusunnya Laporan Hasil Reriu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reriu Laporan Kinerja	2	Terusunnya Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja	Terusunnya Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja	Laporan	9	9	100.00	
3	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	1	1	100.00	
4	Terusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	4	Terusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan AP/PP	Dokumen	3	2	66.67	
5	Terealisasiya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Terusunnya Laporan Hasil Telaah Intern antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Terusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	12	120.00	
7	Terusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	7	Terusunnya rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan.
Evaluasi AKIP
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan
Pengawasan Desa
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan
monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APJP
-
Telaah Intern
-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu : berhasil melebihi targetnya karena adanya tugas mandatori pengawasan tertentu lainnya yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan seperti penanganan/klarifikasi aduan masyarakat
Rekomendasi Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan
Terdapat dukungan Sekretariat dalam memfasilitasi penyusunan Perubahan PKPT

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
-
Evaluasi AKIP
-
Pengawasan Desa
-
monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APJP
Beberapa aktivitas pengawasan yang dijalankan sudah ditindaklanjuti secara cepat oleh obrik sebelum terbit laporan sehingga tidak membutuhkan monitoring tindak lanjutnya
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan 1 sehingga realisasinya juga masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-
Rekomendasi Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah menyelesaikan laporan atas pelaksanaan audit kinerja yang telah selesai di akhir Triwulan II dan melanjutkan pengawasan sesuai dengan RO tiap bulan

Evaluasi AKIP

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV

Pengawasan Desa

Melaksanakan pengawasan sesuai dengan RO tiap bulan

monitoring dan evaluasi tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV

Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Tahun 2025 di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu : Menjalankan aktivitas pengawasan sesuai PKPT Tahun 2025 dengan menyesuaikan rapat operasional tiap bulannya serta memperhatikan prioritas jika mendapatkan tugas tambahan/ tugas mandatori di luar PKPT

Rekomendasi Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan

Sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena penyusunan PKPT selanjutnya untuk mengikuti perubahan anggaran APBD Tahun 2025 masih di Triwulan IV

Wonogiri, 16 Juli 2025

Auditor Pertama

PAMELA DEVI CAHYARINI, S.Ak.
199703122020122007



MONTORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: E.EKO KRISTIYANTO,S.IP
: Auditor Madya
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE 2

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terusunannya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Terusunannya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	
2	Terusunannya Laporan Hasil Reriv Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reriv Laporan Kinerja	2	Terusunannya Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja	Terusunannya Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja	Laporan	9	9	100.00	
3	Terusunannya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Terusunannya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	1	1	100.00	
4	Terusunannya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	Terusunannya dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	3	2	66.67	
5	Terealisasiya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terpentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terpentuk	5	Terusunannya Laporan Hasil Telaah Intern antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Terusununya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Terusununya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	12	120.00	
7	Terusununya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Diusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Diusun	7	Terusununya rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang diusun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang diusun	Rekomendasi	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan.
Evaluasi AKIP
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan
Pengawasan Desa
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan
monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APP
-
Telaah Intern
-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu : berhasil melebihi targetnya karena adanya tugas mandatori pengawasan tertentu lainnya yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan seperti penanganan/karifikasi aduan masyarakat
Rekomendasi Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan
Terdapat dukungan Sekretariat dalam memfasilitasi penyusunan Perubahan PKPT

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
-
Evaluasi AKIP
-
Pengawasan Desa
-
monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APP
Beberapa aktivitas pengawasan yang dijalankan sudah ditindaklanjuti secara cepat oleh obrik sebelum terbit laporan sehingga tidak membutuhkan monitoring tindak lanjutnya
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan 1 sehingga realisasinya juga masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-
Rekomendasi Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah menyelesaikan laporan atas pelaksanaan audit kinerja yang telah selesai di akhir Triwulan II dan melanjutkan pengawasan sesuai dengan RO tiap bulan

Evaluasi AKIP

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjutnya hasil pemeriksaan APIP pada triwulan III dan IV

Pengawasan Desa

Melaksanakan pengawasan sesuai dengan RO tiap bulan

monitoring dan evaluasi tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada triwulan III dan IV

Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Tahun 2025 di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu : Menjalankan aktivitas pengawasan sesuai PKPT Tahun 2025 dengan menyesuaikan rapat operasional tiap bulannya serta memperhatikan prioritas jika mendapatkan tugas tambahan/ tugas mandatori di luar PKPT

Rekomendasi Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan

Sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena penyusunan PKPT selanjutnya untuk mengikuti perubahan anggaran APBD Tahun 2025 masih di Triwulan IV



MARDIANTO, SE
19740124 194903 1 002

Wonogiri, 16 Juli 2025

Auditor Madya

E. EKO KRISTIVANTO, S.IP
196707211990031005

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : ARIEF WULANDARI, S.P, M.P
Jabatan Pelapor : PPUPD Muda
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atas	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Tersusunnya Laporan Evaluasi atas Implementasi AKIP/ Evaluasi LKJIP Tahun 2024	Laporan	13	13	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan	1	1	100.00	
			3	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Reviu Manajemen ASN	Tersusunnya Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	0	0	0.00	
			4	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Pengawasan Urusan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Pengawasan Urusan Pemerintah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0.00	
			5	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Reviu atas LPPD	Tersusunnya Laporan Reviu atas LPPD	Laporan	1	1	100.00	
			6	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu (Dokumen Rencana Pembangunan)	Tersusunnya Laporan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2026	Laporan	0	0	0.00	
				Tersusunnya Laporan Reviu Rancangan Akhir RPJMD	Tersusunnya Laporan Reviu Rancangan Akhir Renstra	Laporan	1	1	100.00	
						Laporan	0	0	0.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
			7	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah	Terusunnya Laporan Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah	Laporan	0	0	0.00	
8	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	8	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Terusunnya Dokumen PKPT Tahun 2025 sesuai dengan standar aturan yang berlaku	Dokumen	1	1	100.00	
9	Terealisasiya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9	Terealisasiya Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terusunnya Laporan Pendampingan Pemantauan Implementasi RTP	Laporan	1	1	100.00	
					Terusunnya Laporan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Wonogiri	Laporan	1	1	100.00	
					Terusunnya Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Laporan	1	1	100.00	
					Terusunnya Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026	Laporan	0	0	0.00	
10	Terealisasiya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	Terlaksananya Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Perencanaan (Ex Ante) dan Pelaksanaan (On Going) Tahun 2025	Terusunnya Laporan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan (Ex Ante)	Laporan	2	3	150.00	
11	Terealisasiya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11	Terealisasiya kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui monitoring dan Asistensi pembangunan Zona Integritas	Terusunnya Laporan Monitoring Pembangunan Zona Integritas	Laporan	1	1	100.00	
12	Terealisasiya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengakan Integritas	12	Terlaksananya Pendampingan Asistensi dan verifikasi Pengakan Integritas melalui Monitoring LHKAN	Terusunnya Laporan Monitoring Laporan LHKAN	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Evaluasi AKIP	
1. Tata cara dan penyusunan Laporan telah dilengkapi dengan pedoman / regulasi yang memadai	
2. Pra Evaluasi dilakukan reviu atas Dokumen LkJP yang telah berkolaborasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri	
3. Pasca Evaluasi dilakukan Panel antar Tim maka tercipta keseragaman dalam penyusunan laporan	
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	
Pelaksanaan atas Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2024 telah terealisasi di Triwulan I dengan faktor pendukungnya adalah pemahaman definisi atas benturan kepentingan yang rata-rata telah memadai	
Reviu Manajemen ASN	-
Pengawasan Urusan Pemerintahan	
-	
Reviu atas LPPD	-
Telah terlaksana di Triwulan I dengan beberapa faktor pendukungnya yaitu :	
1. Kesesuaian pelaksanaan tahapan reviu dengan agenda kerja reviu LPPD	
2. Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.	
Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2026	-
-	
Reviu Rancangan Akhir RPJMD	-
1. Petugas Reviu ditingkatkan kompetensinya melalui Bimtek secara on line	
2. Penambahan personil reviu sebanyak 2 Orang	
Reviu Rankhir Renstra	-
-	
Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah	-
-	
Dokumen PKPT Perubahan Tahun 2025	-
Penyelenggaraan rapat penyusunan dokumen PKPT Perubahan Tahun 2025 oleh Tim Penyusun dengan memperhatikan indikator dalam pedoman MCSP Tahun 2025 yang terbit di akhir Triwulan I untuk menjadi salah satu dasar dalam perubahan PKPT Tahun 2025	
Pendampingan Pemantauan Implementasi RTP	-
Telah terselesaikan di Triwulan I atas monitoring implementasi RTP semester II Tahun 2024 dengan faktor pendukungnya yaitu terkait pemahaman penyelenggaraan SPIP di Level OPD telah memadai	
Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	
1. Kolaborasi / hubungan yang baik antara pihak APIP dengan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	
2. Pelaksanaan Pelaksanaan pendampingan ketika Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.	
Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	-
Koordinasi dan kerjasama yang baik antara tim pendamping dengan semua perangkat daerah dalam mengisi kertas kerja penilaian mandiri SPIP	
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026	
-	

Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Telah terlaksana evaluasi internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2025 dan Tahap Pelaksanaan atas Triwulan I dan II Tahun 2025 dengan beberapa faktor pendukungnya adalah sebagai berikut :

- 1. Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi
- 2. Tersedia aplikasi rewiu dari Kemengan
- 3. Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

Monitoring Zona Integritas

- 1. Dukungan dari Pimpinan
- 2. Rutin dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Pembina dan Tim penilai

Monitoring Laporan LHKAN

Telah terlaksana di Triwulan I dengan beberapa faktor pendukungnya yaitu :

- 1. Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai
- 2. Bentuk laporan sederhana

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Evaluasi AKIP	1. Keterbatasan SDM APIP yang mengevaluasi
	2. Pada saat evaluasi berlangsung terkadang laman resmi Perangkat Daerah tersebar virus mengakibatkan proses evaluasi terhambat karena salah satu indikator penilaian akip adalah ketepatan waktu dalam mengunggah dokumen pada laman.
	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
	-
	Reviu Manajemen ASN
	Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II. Hal ini dikarenakan data-data yang dibutuhkan dalam proses Reviu baru tersedia di sekitar akhir Triwulan III
	Pengawasan Urusan Pemerintahan
	Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II
	Reviu atas LPPD
	Telah terlaksana di Triwulan I dengan beberapa hambatan yang dihadapi yaitu :
1. Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung	
2. Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD	
3. Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.	
Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2026	
Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II	
Reviu Rancangan Akhir RPJMD	
1. Proses tindak lanjut dari Obrik memakan waktu yang lama, menyebabkan penyusunan LHP terhambat.	
2. Pemberian Materi reviu dengan waktu yang mendekati deadline (tidak sesuai jadwal agenda kerja)	
Reviu Rankhir Renstra	
Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II	
Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah	
Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II	
Dokumen PKPT Perubahan Tahun 2025	
-	
Pendampingan Pemantauan Implementasi RTP	
Telah terselesaikan pelaksanaannya di Triwulan I atas monitoring implementasi RTP semester II Tahun 2024 dengan faktor penghambatnya adalah kesulitan dalam menemukan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan	
Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	
Perangkat Daerah yang didampingi sebanyak 53 PD, namun Pendampingnya hanya 5 Orang	
Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	
1. Kurang anggaran untuk pelaksanaan FGD di luar tempat kerja dengan pertimbangan waktu yang disipkan akan lebih banyak dan lebih intens dalam pengisian kertas kerja penilaian SPIP	
2. Kompetensi pelaksana penilai mandiri belum sepenuhnya optimal	
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026	
Pelaksanaan masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasinya di Triwulan II	

Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Berikut adalah beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses evaluasi internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Triwulan I dan II Tahun 2025 :

1. Tim Strategic Transformation Unit (STU) terlambat dalam melaksanakan monitoring
2. Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

Monitoring Zona Integritas

Faktor Penghambat : Orbitik telah merasa jenuh

Monitoring Laporan LHKAN

Faktor penghambat dalam pelaksanaan monitoring LHKAN adalah jika ada pegawai yang telat dalam melaporkan LHKAN

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Evaluasi AKIP
Peningkatan kompetensi APP melalui Pelatihan/Diklat/Bimtek atau pelatihan dikantor sendiri guna pembaharuan ilmu/materi dan penyamaan persepsi
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
Tindak lanjutnya adalah persiapan pelaksanaan Monev Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2025 di Triwulan III nanti
Reviu Manajemen ASN
Tindak lanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan reviu untuk manajemen ASN di Triwulan III dengan menginformasikan ke perangkat daerah terkait untuk dapat mempersiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kelancaran proses reviu di akhir Triwulan III.
Pengawasan Urusan Pemerintahan
Tindak lanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Triwulan III pada perangkat daerah terkait yang telah direncanakan dalam dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025.
Reviu atas LPPD
Pelaksanaan atas Reviu LPPD telah terselesaikan di Triwulan I, namun untuk tindak lanjutnya di tahun berikutnya agar terjadi peningkatan yang lebih baik untuk mengurangi hambatan yang ada, yaitu melaksanakan sosialisasi dan rapat koordinasi diawal waktu sebelum proses reviu dilakukan
Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2026
Tindak lanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan reviu rankhir Renja 2026 di Triwulan III pada perangkat daerah terkait yang telah direncanakan dalam dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025.
Reviu Rancangan Akhir RPJMD
Tindak lanjutnya untuk mengatasi faktor penghambat yang ada, adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi dengan Obrik lebih intensif 2. Berurat ke orbik untuk mengangatkan waktu pelaksanaan penugasan
Reviu Rankhir Renstra
Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah mempersiapkan dalam pelaksanaan reviu rankhir Renstra pada perangkat daerah terkait sesuai yang telah dicantumkan dalam rencana PKPT Tahun 2025
Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah
Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah mempersiapkan dalam pelaksanaan monitoring SPM pada perangkat daerah terkait sesuai yang telah dicantumkan dalam rencana PKPT Tahun 2025
Dokumen PKPT Perubahan Tahun 2025
Belum ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena penyusunan perubahan kedua atas PKPT Tahun 2025 sebagai tindak lanjut atas perubahan APBD Tahun 2025, rencana pelaksanaannya masih di Triwulan IV
Pendampingan Pemantauan Implementasi RTP
Tindak lanjutnya di Triwulan II adalah melakukan persiapan dalam pemantauan atas dokumen RTP Semester I Tahun 2025 yang pelaksanaan monitoringnya di Triwulan III

Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPP Terintegrasi

Peningkatan kompetensi APJP agar lebih banyak lagi SDM yang bersertifikasi untuk melakukan penguasaan penjaminan kualitas

Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPP Terintegrasi

Tindak lanjut untuk tahun berikutnya jika memungkinkan untuk dilakukan usulan penambahan anggaran untuk pelaksanaan FGD di luar tempat kerja untuk optimalisasi pendampingan dengan waktu yang lebih banyak

Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah pelaksanaan atas asistensi dan evaluasi penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026

Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

- 1. Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara APJP, tim STU dan OPD pengampu
- 2. Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi maupun

Monitoring Zona Integritas

Secara berkala melakukan sosialisasi

Monitoring Laporan LHKAN

Tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena telah terselesaikan pelaksanaannya di Triwulan I dengan laporannya sudah dikirimkan di Triwulan II Bulan April 2025

 INSPEKTUR INSPEKTORAT WONOGIRI MAFDIANTO, SE 19710224 199903 1 002 <td> Wonogiri, 16 Juli 2025 PPUPD Muda ARIEF WULANDARI, S.P, M.P 198203272005012009 </td>	Wonogiri, 16 Juli 2025 PPUPD Muda ARIEF WULANDARI, S.P, M.P 198203272005012009
---	--

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : ANDRIYANTO TULUS WIJAYA, S.Pt
Jabatan Pelapor : PPUPD Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Tersusunnya Laporan Evaluasi atas Implementasi AKIP/ Evaluasi LKJP Tahun 2024	Laporan	13	13	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan	1	1	100.00	
			3	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Reviu Manajemen ASN	Tersusunnya Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	0	0	0.00	
			4	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Pengawasan Urusan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0.00	
			5	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Reviu atas LPPD	Tersusunnya Laporan Reviu atas LPPD	Laporan	1	1	100.00	
			6	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu (Dokumen Rencana Pembangunan)	Tersusunnya Laporan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2026	Laporan	0	0	0.00	
				Tersusunnya Laporan Reviu Rancangan Akhir RPJMD	Tersusunnya Laporan Reviu Rancangan Akhir Renstra	Laporan	1	1	100.00	
						Laporan	0	0	0.00	

			Kinerja							
No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
			7	Terlaksananya Pengawasan tujuan tertentu yaitu Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah	Terusunnya Laporan Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah	Laporan	0	0	0,00	
8	Terusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	8	Terusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Terusunnya Dokumen PKPT Tahun 2025 sesuai dengan standar aturan yang berlaku	Dokumen	1	1	100,00	
9	Terealisasi Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9	Terealisasi Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terusunnya Laporan Pendampingan Pemantauan Implementasi RTP	Laporan	1	1	100,00	
					Terusunnya Laporan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Wonogiri	Laporan	1	1	100,00	
					Terusunnya Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Laporan	1	1	100,00	
					Terusunnya Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026	Laporan	0	0	0,00	
10	Terealisasi Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	Terlaksananya Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Perencanaan (Ex Ante) dan Pelaksanaan (On Going) Tahun 2025	Terusunnya Laporan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan (Ex Ante)	Laporan	2	3	150,00	
11	Terealisasi Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11	Terealisasi kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui monitoring dan Asistensi pembangunan Zona Integritas	Terusunnya Laporan Monitoring Pembangunan Zona Integritas	Laporan	1	1	100,00	
12	Terealisasi Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12	Terlaksananya Pendampingan Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas melalui Monitoring LHKAN	Terusunnya Laporan Monitoring Laporan LHKAN	Laporan	1	1	100,00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Evaluasi AKIP	1. Tata cara dan penyusunan Laporan telah dilengkapi dengan pedoman / regulasi yang memadai
	2. Pra Evaluasi dilakukan reviu atas Dokumen LkJP yang dilakukan dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri
	3. Pasca Evaluasi dilakukan Panel antar Tim maka tercipta keseragaman dalam penyusunan laporan
	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
	Pelaksanaan atas Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2024 telah terealisasi di Triwulan I dengan faktor pendukungnya adalah pemahaman definisi atas benturan kepentingan yang rata-rata telah memadai
	Reviu Manajemen ASN
	-
	Pengawasan Urusan Pemerintahan
	-
	Reviu atas LPPD
Telah terlaksana di Triwulan I dengan beberapa faktor pendukungnya yaitu :	
1. Kesesuaian pelaksanaan tahapan reviu dengan agenda kerja reviu LPPD	
2. Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.	
Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2026	
-	
Reviu Rancangan Akhir RPJMD	
1. Petugas Reviu ditingkatkan kompetensinya melalui Bimtek secara on line	
2. Penambahan personil reviu sebanyak 2 Orang	
Reviu Rankhir Renstra	
-	
Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah	
-	
Dokumen PKPT Perubahan Tahun 2025	
-	
Pendampingan Pemantauan Implementasi RTP	
Telah terselesaikan di Triwulan I atas monitoring implementasi RTP semester II Tahun 2024 dengan faktor pendukungnya yaitu terkait pemahaman penyelenggaraan SPIP di Level OPD telah memadai	
Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	
1. Kolaborasi / hubungan yang baik antara APJP dengan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	
2. Pelaksanaan Pelaksanaan pendampingan ketika Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.	
Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	

Koordinasi dan kerjasama yang baik antara tim pendamping dengan semua perangkat daerah dalam mengisi kertas kerja penilaian mandiri SPP
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026
-
Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi
Telah terlaksana evaluasi internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2025 dan Tahap Pelaksanaan atas Triwulan I dan II Tahun 2025 dengan beberapa faktor pendukungnya adalah sebagai berikut :
1. Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi 2. Tersedia aplikasi rewu dari Kemenpan 3. Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri
Monitoring Zona Integritas
1. Dukungan dari Pimpinan 2. Rutin dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Pembina dan Tim penilai
Monitoring Laporan LHKAN
Telah terlaksana di Triwulan I dengan beberapa faktor pendukungnya yaitu :
1. Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai 2. Bentuk laporan sederhana

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Evaluasi AKIP	1. Keterbatasan SDM APIP yang mengevaluasi
	2. Pada saat evaluasi berlangsung terkadang laman resmi Perangkat Daerah tersebar virus mengakibatkan proses evaluasi terhambat karena salah satu indikator penilaian akip adalah ketepatan waktu dalam mengunggah dokumen pada laman
	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
	-
	Reviu Manajemen ASN
Reviu atas LPPD	Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II. Hal ini dikarenakan data-data yang dibutuhkan dalam proses Reviu baru tersedia di sekitar akhir Triwulan III
	Pengawasan Urusan Pemerintahan
	Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II
	Reviu atas LPPD
	Telah terlaksana di Triwulan I dengan beberapa hambatan yang dihadapi yaitu : 1. Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung 2. Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD 3. Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.
Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2026	Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II
	Reviu Rancangan Akhir RPJMD
	1. Proses tindak lanjut dari Obrik memakan waktu yang lama, menyebabkan penyusunan LHP terhambat. 2. Pemberian Materi reviu dengan waktu yang mendekati deadline (tidak sesuai jadwal agenda kerja)
	Reviu Rankhir Renstra
	Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II
Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah	Realisasi masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasi pelaksanaannya di Triwulan II
	Dokumen PKPT Perubahan Tahun 2025
	Penyelenggaraan rapat penyusunan dokumen PKPT Perubahan Tahun 2025 oleh Tim Penyusun dengan memperhatikan indikator dalam pedoman MCSP Tahun 2025 yang terbit di akhir Triwulan I untuk menjadi salah satu dasar dalam perubahan PKPT Tahun 2025

Pendampingan Pemantauan Implementasi RTP Telah terselesaikan pelaksanaannya di Triwulan I atas monitoring implementasi RTP semester II Tahun 2024 dengan faktor penghambatnya adalah kesulitan dalam menemukan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah yang didampingi sebanyak 53 PD, namun Pendampingnya hanya 5 Orang Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 1. Kurang anggaran untuk pelaksanaan FGD di luar tempat kerja dengan pertimbangan waktu yang disiapkan akan lebih banyak dan lebih intens dalam pengisian kertas kerja penilaian SPIP 2. Kompetensi pelaksana penilai mandiri belum sepenuhnya optimal Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026 Pelaksanaan masih di Triwulan III sehingga belum tersedia target dan realisasinya di Triwulan II Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Berikut adalah beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Triwulan I dan II Tahun 2025 : 1. Tim Strategic Transformation Unit (STU) tertambat dalam melaksanakan monitoring 2. Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual. Monitoring Zona Integritas Faktor Penghambat : Orbak telah merasa jenuh Monitoring Laporan LHKAN Faktor penghambat dalam pelaksanaan monitoring LHKAN adalah jika ada pegawai yang telat dalam melaporkan LHKAN

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Evaluasi AKIP
Peningkatan kompetensi APJP melalui Pelatihan/Diklat/Bimtek atau pelatihan dil Kantor sendiri guna pembaharuan ilmu/materi dan penyamaan persepsi
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
Tindak lanjutnya adalah persiapan pelaksanaan Monev Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2025 di Triwulan III nanti
Revisi Manajemen ASN
Tindak lanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan revisi untuk manajemen ASN di Triwulan III dengan menginformasikan ke perangkat daerah terkait untuk dapat mempersiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kelancaran proses revisi di akhir Triwulan III.
Pengawasan Urusan Pemerintahan
Tindak lanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Triwulan III pada perangkat daerah terkait yang telah direncanakan dalam dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025.
Revisi atas LPPD
Pelaksanaan atas Revisi LPPD telah terselesaikan di Triwulan I, namun untuk tindak lanjutnya di tahun berikutnya agar terjadi peningkatan yang lebih baik untuk mengurangi hambatan yang ada, yaitu melaksanakan sosialisasi dan rapat koordinasi diawal waktu sebelum proses revisi dilakukan
Revisi Rancangan Akhir Renja Tahun 2026
Tindak lanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan revisi rankhir Renja 2026 di Triwulan III pada perangkat daerah terkait yang telah direncanakan dalam dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025.
Revisi Rancangan Akhir RPJMD
Tindak lanjutnya untuk mengatasi faktor penghambat yang ada, adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi dengan Obrik lebih intensif 2. Berurat ke orbik untuk mengingatkan waktu pelaksanaan penugasan
Revisi Rankhir Renstra
Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah mempersiapkan dalam pelaksanaan revisi rankhir Renstra pada perangkat daerah terkait sesuai yang telah dicantumkan dalam rencana PKPT Tahun 2025
Monitoring atas Pelaksanaan SPM pada perangkat daerah
Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah mempersiapkan dalam pelaksanaan monitoring SPM pada perangkat daerah terkait sesuai yang telah dicantumkan dalam rencana PKPT Tahun 2025
Dokumen PKPT Perubahan Tahun 2025
Belum ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena penyusunan perubahan kedua atas PKPT Tahun 2025 sebagai tindak lanjut atas perubahan APBD Tahun 2025, rencana pelaksanaannya masih di Triwulan IV
Pendampingan Pemantauan Implementasi RTP
Tindak lanjutnya di Triwulan II adalah melakukan persiapan dalam pemantauan atas dokumen RTP Semester I Tahun 2025 yang pelaksanaan monitoringnya di Triwulan III
Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Peningkatan kompetensi APiP agar lebih banyak lagi SDM yang bersertifikasi untuk melakukan penguasaan penjaminan kualitas

Pendampingan Penilaian Mandiri MutuTas penyelenggaraan SPiP Terintegrasi

Tindak lanjut untuk tahun berikutnya jika memungkinkan untuk dilakukan usulan penambahan anggaran untuk pelaksanaan FGD di luar tempat kerja untuk optimalisasi pendampingan dengan waktu yang lebih banyak

Astistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah pelaksanaan atas astistensi dan evaluasi penyusunan RR Strategis dan Operasional OPD Tahun 2026

Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

- 1. Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara APiP, tim STU dan OPD pengampu
- 2. Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi manpower

Monitoring Zona Integritas

Secara berkala melakukan sosialisasi

Monitoring Laporan LHKAN

Tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena telah terselesaikan pelaksanaannya di Triwulan I dengan laporannya sudah dikirimkan di Triwulan II Bulan April 2025

 INSPEKTUR INSPEKTORAT WONOGIRI INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19770124 199903 1 002	 Wongiri, 16 Juli 2025 PPUPD Pertama ANDRIYANTO TULUS WIJAYA, S.Pt 198101262010041001
---	---

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SUKIYATNO, S.E.
Jabatan Pelapor : Auditor Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasanan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja OPD	Laporan	1	1	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	8	8	100.00	
3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	2	1	50.00	
4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Dokumen	3	3	100.00	
5	Terealisasiya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	6	9	112.50	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja	Terlaksananya penguasaan yang sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan
Reviu Laporan Kinerja	Araban pimpinan untuk percepatan penyelesaian di Triwulan II sesuai yang tertuang dalam PKPT Tahun 2025
Pengawasan Desa	
Monitoring Tindak Lanjut	Koordinasi dan respon yang baik dari perangkat daerah terkait yang dilakukan monitoring tindak lanjut sehingga dapat terlaksana penguasaan yang sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan
Telaah Intern	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Banyaknya penguasaan mandatori terkait penanganan pengaduan sebanyak 4 sampai dengan Triwulan II sehingga target yang ditetapkan sesuai penetapan PKPT mengalami peningkatan

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja	
Reviu Laporan Kinerja	
Pengawasan Desa	Terdapat 3 penguasaan berupa penganggaran aduan masyarakat pada pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah masuk di PKPT Perubahan 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan regulier atas pengawasan desa tertunda atas 1 desa sampai dengan Triwulan II
Monitoring Tindak Lanjut	
Telaah Intern	Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II Tahun 2025 sehingga target dan realisasinya masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan Revisi Laporan Kinerja Monitoring atas tindak lanjutnya di Triwulan III Pengawasan Desa Melaksanakan pengawasan desa yang tertunda atas 1 desa di Triwulan III dengan tetap memperhatikan hasil rapat Rencana Operasional (RO) bulanan untuk menyesuaikan jika ada aktivitas pengawasan di luar perencanaan yang menjadi prioritas di Triwulan III Monitoring Tindak Lanjut Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV. Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Perubahan Tahun 2025 yaitu pelaksanaannya di Triwulan IV Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan	
 INSPEKTUR WONOGIRI MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonogiri, 16 Juli 2025 Auditor Pertama  SUKIYATNO, S.E. 197408112009011005

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : NENI SAPTANINGRUM, S.Sos
Jabatan Pelapor : Auditor Madya
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

		Kinerja								
No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja OPD	Laporan	1	1	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	8	8	100.00	
3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	2	1	50.00	
4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	Dokumen	3	3	100.00	
5	Terealisasi/nya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terpenting	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terpenting	5	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	6	9	150.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja
Terlaksananya pengasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan
Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan untuk percepatan penyelesaian di Triwulan II sesuai yang tertuang dalam PKPT Tahun 2025
Pengawasan Desa
-
Monitoring Tindak Lanjut
Koordinasi dan respon yang baik dari perangkat daerah terkait yang dilakukan monitoring tindak lanjut sehingga dapat terlaksana pengasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan
Telaah Intern
-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Banyaknya pengasan mandatori terkait penanganan pengaduan sebanyak 4 sampai dengan Triwulan II sehingga target yang ditetapkan sesuai penetapan PKPT mengalami peningkatan

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja
-
Reviu Laporan Kinerja
-
Pengawasan Desa
Terdapat 3 pengasan berupa pengurangan aduan masyarakat pada pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah masuk di PKPT Perubahan 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan reguler atas pengawasan desa tertunda atas 1 desa sampai dengan Triwulan II
Monitoring Tindak Lanjut
-
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II Tahun 2025 sehingga target dan realisasinya masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja

Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Revisi Laporan Kinerja

Monitoring atas tindak lanjutnya di Triwulan III

Pengawasan Desa

Melaksanakan pengawasan desa yang tertunda atas 1 desa di Triwulan III dengan tetap memperhatikan hasil rapat Rencana Operasional (RO) bulanan untuk menyesuaikan jika ada aktivitas pengawasan di luar perencanaan yang menjadi prioritas di Triwulan III

Monitoring Tindak Lanjut

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV.

Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Perubahan Tahun 2025 yaitu pelaksanaannya di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

 INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	 Wonogiri, 16 Juli 2025 Auditor Madya NENI SAPTANINGRUM, S.Sos 197104061996032003
---	---

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : AGUS PRIYANTI, A.Md
Jabatan Pelapor : Auditor Penyelia
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

Kinerja										
No	Sasaran Kegiatan Atasasan	Indikator	No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja OPD	Laporan	1	1	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	8	8	100.00	
3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	2	1	50.00	
4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Dokumen	3	3	100.00	
5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	6	9	150.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja
Terlaksananya penguasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan
Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan untuk percepatan penyelesaian di Triwulan II sesuai yang tertuang dalam PKPT Tahun 2025
Pengawasan Desa
-
Monitoring Tindak Lanjut
Koordinasi dan respon yang baik dari perangkat daerah terkait yang dilakukan monitoring tindak lanjut sehingga dapat terlaksana penguasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan
Telaah Intern
-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Banyaknya penguasan mandatori terkait penanganan pengaduan sebanyak 4 sampai dengan Triwulan II sehingga target yang ditetapkan sesuai penetapan PKPT mengalami peningkatan

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja
-
Reviu Laporan Kinerja
-
Pengawasan Desa
Terdapat 3 penguasan berupa penganggaran aduan masyarakat pada pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah masuk di PKPT Perubahan 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan regulier atas pengawasan desa tertunda atas 1 desa sampai dengan Triwulan II
Monitoring Tindak Lanjut
-
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II Tahun 2025 sehingga target dan realisasinya masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan Revisi Laporan Kinerja Monitoring atas tindak lanjutnya di Triwulan III Pengawasan Desa Melaksanakan pengawasan desa yang tertunda atas 1 desa di Triwulan III dengan tetap memperhatikan hasil rapat Rencana Operasional (RO) bulanan untuk menyesuaikan jika ada aktivitas pengawasan di luar perencanaan yang menjadi prioritas di Triwulan III Monitoring Tindak Lanjut Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV. Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Perubahan Tahun 2025 yaitu pelaksanaannya di Triwulan IV Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan	
---	--

INSPEKTUR TATA WONOGIRI INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonogiri, 16 Juli 2025 Auditor Penyelia  AGUS PRIYANTI, A.Md 198108132011012004
--	--

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : DICKY SATRIA, S.E.
Jabatan Pelapor : Auditor Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

		Kinerja								
No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja OPD	Laporan	1	1	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	8	8	100.00	
3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	2	1	50.00	
4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Dokumen	3	3	100.00	
5	Terealisasinya Kesiapan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesiapan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	6	9	150.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja
Terlaksananya penugasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan
Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan untuk percepatan penyelesaian di Triwulan II sesuai yang tertuang dalam PKPT Tahun 2025
Pengawasan Desa
-
Monitoring Tindak Lanjut
Koordinasi dan respon yang baik dari perangkat daerah terkait yang dilakukan monitoring tindak lanjut sehingga dapat terlaksana penugasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan
Telaah Intern
-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Banyaknya penugasan mandatori terkait penanganan pengaduan sebanyak 4 sampai dengan Triwulan II sehingga target yang ditetapkan sesuai penetapan PKPT mengalami peningkatan

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja
-
Reviu Laporan Kinerja
-
Pengawasan Desa
Terdapat 3 penugasan berupa pengawasan aduan masyarakat pada pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah masuk di PKPT Perubahan 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan reguler atas pengawasan desa tertunda atas 1 desa sampai dengan Triwulan II
Monitoring Tindak Lanjut
-
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II Tahun 2025 sehingga target dan realisasinya masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan Reviu Laporan Kinerja Monitoring atas tindak lanjutnya di Triwulan III Pengawasan Desa Melaksanakan pengawasan desa yang tertunda atas 1 desa di Triwulan III dengan tetap memperhatikan hasil rapat Rencana Operasional (RO) bulanan untuk menyesuaikan jika ada aktivitas pengawasan di luar perencanaan yang menjadi prioritas di Triwulan III Monitoring Tindak Lanjut Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV. Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Perubahan Tahun 2025 yaitu pelaksanaannya di Triwulan IV Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan	
--	--

 INSPEKTUR MARDIANTO, SE 1871024 199903 1 002	Wonogiri, 16 Juli 2025 Auditor Pertama  DICKY SATRIA, S.E. 199304142020121002
--	---

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Money
Jabatan Pimpinan Pelapor

: OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH, S.Ak
: Auditor Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	0	0.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	8	8	100.00	
3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	4	3	75.00	
4	Terealisasiya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terpentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terpentuk	4	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
5	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	5	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Dokumen	3	2	66.67	
6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	16	160.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja
-
Revisi Laporan Kinerja
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan dan arahan Inspektur dalam percepatan penyelesaian evaluasi AKIP di Triwulan II
Pengawasan Desa
-
Telaah Intern
-
Monitoring Tindak Lanjut
-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Adanya pengawasan mandatori tambahan di luar perencanaan dalam PKPT di triwulan II terkait pengawasan pengadaan PPPK Tahap II, pengujian alat kesehatan melalui aplikasi Shopi Impuls dan penanganan pengaduan pada 2 desa yang diadakan sehingga meningkatkan realisasi atas pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja
Untuk audit kinerja dan ketepatan belum tercapai karena menunggu penentuan obyek pemeriksaan pada PKPT Perubahan dengan memperhatikan indikator dalam MCSP KPK
Revisi Laporan Kinerja
-
Pengawasan Desa
Untuk audit desa belum tercapai sesuai dengan target karena adanya pengawasan di luar PKPT seperti penanganan pengaduan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II Tahun 2025 sehingga target dan realisasinya masih "0"
Monitoring Tindak Lanjut
Beberapa laporan pemeriksaan belum terselesaikan untuk dilakukan monitoring tindak lanjutnya
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Melaksanakan pengawasan sesuai dengan RO tiap bulan Revisi Laporan Kinerja Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV Pengawasan Desa Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Perubahan Tahun 2025 yaitu pelaksanaannya di Triwulan IV Monitoring Tindak Lanjut Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan	
---	--

 INSPEKTUR PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI MARDIANTO, SE 19710724 199303 1 002	Wonogiri, 16 Juli 2025 Auditor Pertama  OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH, S.Ak 199810142022032007
---	---

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: WIWIT KARYANTI, S.Akt., M.Acc.
: Auditor Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	0	0.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	8	8	100.00	
3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	4	3	75.00	
4	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
5	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	5	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Dokumen	3	2	66.67	
6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	16	160.00	
7	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	7	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja
-
Reviu Laporan Kinerja
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan dan arahan Inspektur dalam percepatan penyelesaian evaluasi AKIP di Triwulan II
Pengawasan Desa
-
Telaah Intern
-
Monitoring Tindak Lanjut
-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Adanya pengawasan mandatori tambahan di luar perencanaan dalam PKPT di triwulan II terkait pengawasan pengadaan PPPK Tahap II, pengujian alat kesehatan melalui aplikasi Shopi Input dan penanganan pengaduan pada 2 desa yang diadakan sehingga meningkatkan realisasi atas pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II
Rekomendasi Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan
Terdapat dukungan Sekretariat dalam memfasilitasi penyusunan Perubahan PKPT

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja
Untuk audit kinerja dan ketepatan belum tercapai karena menunggu penentuan obyek pemeriksaan pada PKPT Perubahan dengan memperhatikan indikator dalam MCSP KPK
Reviu Laporan Kinerja
-
Pengawasan Desa
Untuk audit desa belum tercapai sesuai dengan target karena adanya pengawasan diluar PKPT seperti penanganan pengaduan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II Tahun 2025 sehingga target dan realisasinya masih "0"
Monitoring Tindak Lanjut
Beberapa laporan pemeriksaan belum terselesaikan untuk dilakukan monitoring tindak lanjutnya
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-
Rekomendasi Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja

Melaksanakan pengawasan sesuai dengan RO tiap bulan

Reviu Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV

Pengawasan Desa

Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Perubahan Tahun 2025 yaitu pelaksanaannya di Triwulan IV

Monitoring Tindak Lanjut

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Rekomendasi Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan

Belum ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena penyusunan perubahan PKPT yang kedua dengan mendasarkan pada perubahan APBD 2025, pelaksanaannya masih di Triwulan IV

Wonogiri, 16 Juli 2025

Auditor Pertama

WIWIT KARYANTI, S.Akt., M.Acc.

198301242006042011



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Money
Jabatan Pimpinan Pelapor

: Drs.ARIS WIDODO
: Auditor Madya
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasasan	Indikator	Kinerja						Keterangan	
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi		(%)
1	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	17	17	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	6	5	83.33	
3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Dokumen	6	4	66.67	
4	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	0	0.00	
5	Terealisasiya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Antar Tim	Jumlah tersusunnya laporan hasil telaah antar tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	13	21	161.54	
7	Terealisasiya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Terealisasiya Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan	2	3	150.00	
8	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	8	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Rekomendasi	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Revisi Laporan Kinerja	
Respon cepat dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah terkait serta arahan Inspektur untuk penyelesaian pelaksanaan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah di Triwulan II	
Pengawasan Desa	
Monitoring Tindak Lanjut	
Pengawasan Kinerja	
Telaah Intern	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
Banyaknya penguasan mandatori di luar rencana PKPT Tahun 2025 yang telah ditetapkan seperti penanganan pengaduan masyarakat dan aktivitas pengawasan lainnya	
Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
Percepatan pelaksanaan kegiatan Saber Pungli yang direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dilakukan percepatan di Triwulan II karena adanya perubahan kebijakan dari pusat yang mengharuskan pembubaran Tim Saber Pungli sehingga realisasinya sampai dengan triwulan II melebihi targetnya dengan realisasi yaitu : pada Monitoring MCSP Triwulan I, persiapan pelaksanaan SPI Tahun 2025 dan kegiatan Saber Pungli.	
Rekomendasi Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan	
Terdapat dukungan Sekretariat dalam memfasilitasi penyusunan Perubahan PKPT	

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Revisi Laporan Kinerja
-
Pengawasan Desa
Untuk audit desa belum tercapai sesuai dengan target karena adanya pengawasan di luar PKPT seperti penanganan pengaduan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu
Monitoring Tindak Lanjut
Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi TL APJP masih belum memenuhi target karena pada TW II terdapat penanganan pengaduan masyarakat yang kompleks sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi TLHP APJP akan dilakukan di Triwulan III atau IV
Pengawasan Kinerja
Untuk audit kinerja dan ketepatan belum tercapai karena menunggu penentuan obyek pemeriksaan pada PKPT Perubahan dengan memperhatikan indikator dalam MCSP KPK
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II Tahun 2025 sehingga target dan realisasinya masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-
Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
-
Rekomendasi Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Revisi Laporan Kinerja	
Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjutnya di Triwulan III dan IV	
Pengawasan Desa	
Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan	
Monitoring Tindak Lanjut	
Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV	
Pengawasan Kinerja	
Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan	
Telah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Perubahan Tahun 2025 yaitu pelaksanaannya di Triwulan IV	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
Melanjutkan pelaksanaan pengawasan aktivitas pengawasan dengan tujuan tertentu di triwulan III sesuai yang telah direncanakan dalam PKPT Tahun 2025	
Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
Melanjutkan pelaksanaan kegiatan di Triwulan III sesuai PKPT Tahun 2025 untuk monitoring atas MCSP Triwulan II	
Rekomendasi Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan	
Belum ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena penyusunan perubahan PKPT yang kedua dengan mendasarkan pada perubahan APBD 2025, pelaksanaannya masih di Triwulan IV	

	Wonorejo, 16 Juli 2025 Auditor Madya  Drs. ARIS WIPADO 19660619790031011
--	--

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Movev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: AJENG WULAN HAPSARI, S.Ak
: Auditor Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

Kinerja										
No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	100.00	
3	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	6	6	100.00	
4	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100.00	
5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
6	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	3	75.00	
7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	0	0.00	
8	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	18	180.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan
Pengawasan Keuangan
Terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan
Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan dalam percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP dengan penyelesaian di Triwulan II
Reviu Laporan Keuangan
Dukungan pimpinan dan perangkat daerah terkait sehingga pelaksanaan reviu LKPD Kabupaten Wonogiri dapat berjalan sesuai rencana dan terselesaikan sesuai waktunya
Telaah Intern
-
Monitoring Tindak Lanjut
-
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Adanya pengawasan mandatori tambahan di luar perencanaan dalam PKPT di triwulan II terkait efisiensi anggaran dan klarifikasi atas penanganan pengeduan

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja
-
Pengawasan Keuangan
-
Reviu Laporan Kinerja
-
Reviu Laporan Keuangan
-
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II sehingga realisasinya juga masih "0"
Monitoring Tindak Lanjut
Beberapa laporan pemeriksaan belum terselesaikan untuk dilakukan monitoring tindak lanjutnya
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
Untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah belum tercapai karena pembahasan kerugian daerah dari BPK dilaksanakan pada Triwulan III
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja

Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Pengawasan Keuangan

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah pelaksanaan atas Asistensi Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan BPK RI dengan rencana pelaksanaan sesuai PKP di Bulan September

Revisi Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring tindak lanjutnya di Triwulan III dan IV

Revisi Laporan Keuangan

Tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III maupun IV karena proses review LKPD telah terselesaikan di Triwulan I, kemudian untuk proses tindak lanjutnya dari BPK berada pada sub kegiatan yang lain terkait sub kegiatan monitoring tindak lanjut

Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Tahun 2025

Monitoring Tindak Lanjut

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP pada Triwulan III dan IV

Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani

Pelaksanaan pembahasan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan BPK di Triwulan III

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Wonogiri, 16 Juli 2025

Auditor Pertama

John

AJENG WULAN HAPSARI, S.Ak
199912172022032003

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Money
Jabatan Pimpinan Pelapor

: NINDA SARASWATI, A.Md.Kom
: Pranata Komputer Terampil
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja						Keterangan	
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi		(%)
1	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100.00	
2	Tersusunnya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Tersusunnya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0.00	
3	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

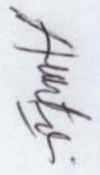
Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
Penyusunan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan data realisasi atas penyediaan surat menyurat sampai dengan Triwulan II

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
Penyusunan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Belum tersedia targetnya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Melanjutkan pelaksanaannya di Triwulan III sesuai yang telah ditargetkan di triwulan III Penyusunan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Belum ada tindak lanjutnya di Triwulan III adalah karena pelaksanaannya masih di Triwulan IV Penyediaan Jasa Surat Menyurat Melanjutkan pelaksanaannya di Triwulan III	
--	--

 INSPEKTORAT WONOREJO INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonorejo, 16 Juli 2025 Pranata Komputer Terampil  NINDA SARASWATI, A.Md.Kom 199710052025062002
---	---

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Money
Jabatan Pimpinan Pelapor

: RINI SETYA HASTUTI, A.Md
: Pranata Komputer Mahir
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

Kinerja										
No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terealisasinya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegekan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegekan Integritas	1	Terlaksananya kegiatan dan pelaporan verifikasi dan klarifikasi LHKAN	Jumlah laporan verifikasi dan klarifikasi LHKAN	Laporan	1	1	100.00	
2	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	Terealisanya Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Kegiatan UPG	Laporan	2	2	100.00	
3	Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	3	Tereleenggaranya penyusunan Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset	Laporan	2	2	100.00	
			4	Tereleenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	Laporan	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Monitoring Laporan LHKAN Telah terlaksana di Triwulan I dengan beberapa faktor pendukungnya yaitu : 1. Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai 2. Bentuk Laporan sederhana Kegiatan UPG : Dukungan pimpinan dan tersedianya admin UPG dalam pelaksanaan kegiatan UPG di Inspektorat Laporan Aset Ketersediaan data dan dokumen pendukung dalam membantu kelancaran penyusunan laporan aset di triwulan II Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah -

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Monitoring Laporan LHKAN Faktor penghambat dalam pelaksanaan monitoring LHKAN adalah jika ada pegawai yang telat dalam melaporkan LHKAN Kegiatan UPG : - Laporan Aset - Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Belum ditetapkan targetnya di Triwulan I sehingga belum ada realisasinya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Monitoring Laporan LHKAN Tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena telah terselesaikan pelaksanaannya di Triwulan I dengan laporannya sudah dikirimkan di Triwulan II Bulan April 2025 Kegiatan UPG : Melanjutkan pelaksanaan kegiatan UPG di Triwulan III Laporan Aset Melanjutkan pelaksanaannya sesuai rencana pelaksanaan untuk penyusunan laporan aset di Triwulan III Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Melanjutkan pelaksanaannya sesuai rencana pelaksanaannya di Triwulan III	
---	--

INSPEKTUR  MASDIANTO, SE 19710724 199503 1 002	Wonogiri, 16 Juli 2025 Prangta Komputer Mahir  RINI SETYA HASTUTI, A.Md 198110262010012015
--	--

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: BAMBANG MAHESTHI WIBOWO, S.Kom
: Pranata Komputer Abdi Munda
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE-2

No	Sasaran Kegiatan Atasran	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terealisasiya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Tersusunnya Laporan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan capaian MCP KPK	Laporan	0	0	0,00	
2	Terealisasiya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2	Terselenggaranya Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengajuan gaji	Dokumen	8	8	100,00	
			3	Terselenggaranya Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengajuan TPP	Dokumen	8	8	100,00	
4	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Terselenggaranya Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah website Inspektorat	Aplikasi	1	1	100,00	
			5	Terselenggaranya Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah aplikasi penatausahaan tindak lanjut pemeriksaan	Aplikasi	1	1	100,00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Laporan Capaian MCSP KPK :
-
Dokumen Pengajuan Gaji
Ketersediaan data dan dokumen pendukung dalam penyusunan dokumen pengajuan gaji
Dokumen Pengajuan TPP
Ketersediaan data pendukung dalam membantu kelancaran penyusunan dokumen pengajuan TPP sesuai ketentuan
Website Inspektorat : pemeliharaan rutin website Inspektorat sesuai rencana
Aplikasi penatausahaan tindak lanjut : terlaksana rutin pemeliharannya setiap tahun

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Laporan Capaian MCSP KPK :
TARGET pelaksanaan di Triwulan IV sehingga capaian di Triwulan II masih "0"
Dokumen Pengajuan Gaji
-
Dokumen Pengajuan TPP
-
pemeliharaan website
-
Aplikasi penatausahaan tindak lanjut
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Laporan Capaian MCSP KPK :

Tindak lanjutnya di Triwulan III sebagai admin adalah melakukan pemantauan penilaian MCSP oleh KPK melalui aplikasi juga dan ikut dalam rapat pemantauan capaian MCSP Triwulan

Dokumen Pengujian Gaji

Melanjutkan pelaksanaannya untuk Triwulan III

Dokumen Pengujian TPP

Melanjutkan pelaksanaannya di Triwulan III

Website Inspektorat : melanjutkan pemeliharaan website secara rutin

Aplikasi penatausahaan tindak lanjut : melanjutkan pemeliharaan sesuai rencana



MARDIANTO, SE
19716124 199903 1 002

Wonogiri, 16 Juli 2025

Pramana Komputer Abdi Muda

BAMBANG MAHESHI WIBOWO, S.Kom
198412092009031003

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Movev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: FITRI LESTARI, S.Kom
: Pranata Komputer Mahr
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja						Keterangan	
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi		(%)
1	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Tersusunnya Laporan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan SPI	Laporan	0	0	0,00	
2	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	2	Tereleenggaranya tertib administrasi kepegawalan perangkat daerah	Jumlah laporan tertib administrasi kepegawalan	Laporan	12	12	100,00	
3	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	3	Tereleenggaranya tertib administrasi kepegawalan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawalan	Laporan	6	6	100,00	
4	Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Tereleenggaranya tertib administrasi kepegawalan perangkat daerah	Jumlah laporan IPASN	Laporan	0	0	0,00	
5	Terealisasinya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Tereleenggaranya tertib administrasi kepegawalan perangkat daerah	Jumlah laporan pendidikan dan pelatihan	Laporan	2	2	100,00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Laporan SPI
-
Laporan Tertib Administrasi Kepegawalan : Tersedianya data pendukung dalam penyusunan laporannya
Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawalan : tersedianya data dalam penyusunan laporan mekanisme kepegawalan bulan Januari sampai dengan Juni 2025
Laporan IPASN : Realisasi di Triwulan IV sehingga belum tersedia target dan realisasinya di Triwulan II
Laporan pendidikan dan pelatihan : tersedianya data rencana dan realisasi atas pendidikan dan pelatihan pegawai sampai dengan Triwulan II

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Laporan SPI : Realisasi di Triwulan IV sehingga belum ada target dan realisasinya di Triwulan II
Laporan Tertib Administrasi Kepegawalan
-
Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawalan
-
Laporan IPASN
-
Laporan pendidikan dan pelatihan
-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Laporan SPI :

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah pemantauan atas pelaksanaan SPI Tahun 2025

Laporan Tertib Administrasi Kepegawaian : melanjutkan pelaksanaannya di triwulan III sesuai rencana awalnya

Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian : melanjutkan pelaksanaan penyusunan laporan mekanisme kepegawaian bulanan di Triwulan III Tahun 2025

Laporan IPASN : melakukan update data secara rutin untuk data pendukung laporan IPASN di Triwulan IV

Laporan pendidikan dan pelatihan : Melanjutkan pelaksanaan atas laporan pendidikan dan pelatihan pegawai di Triwulan III

INSPEKTUR  MAEDHANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonorejo, 16 Juli 2025 Purnata Komputer Mahir  PTIRI LESTARI, S.Kom 198307122010012031
---	--

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : GUSTINA DWI LESTIANI, S.Ak.
Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja OPD	Laporan	1	1	100.00	
2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	0	0	0.00	
3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	3	3	150.00	
4	Terealisasinya Kespsekatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kespsekatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim	Laporan	0	0	0.00	
5	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja
Terlaksananya penguasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan
Pengawasan Desa
Monitoring Tindak Lanjut
Koordinasi dan respon yang baik dari perangkat daerah terkait yang dilakukan monitoring tindak lanjut sehingga dapat terlaksana penguasan yang sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan
Telaah Intern
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Terlaksananya aktivitas pengawasan sesuai dengan PKPT atas Reviu DAV di Triwulan II

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja
Pengawasan Desa
Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada
Monitoring Tindak Lanjut
Telaah Intern : Belum ditetapkan targetnya di Triwulan II Tahun 2025 sehingga target dan realisasinya masih "0"
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pengawasan Kinerja

Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Pengawasan Desa

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan desa sesuai rencana dalam PKPT Tahun 2025 untuk Triwulan III

Monitoring Tindak Lanjut

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APFIP pada triwulan III dan IV.

Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Perubahan Tahun 2025 yaitu pelaksanaannya di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan desa sesuai rencana dalam PKPT Tahun 2025 untuk Triwulan III

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP pada triwulan III dan IV.

Telaah Intern : Pelaksanaan menyesuaikan rencana di PKPT Perubahan Tahun 2025 yaitu pelaksanaannya di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melaksanakan pengawasan dengan mempertimbangkan prioritas aktivitas pengawasan tiap bulannya melalui rapat Rencana Operasional (RO) tiap bulan

Auditor Ahli Pertama

Thrup

GUSTINA DWI LESTIANI, S.AK.
199806292025062004

INSPEKTUR

MARDIANTO, SE
710124 199903 1 002